



**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON
TUNAI (BPNT) DI DESA KAJARHARJO KECAMATAN
KALIBARU KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

**Oleh :
Nunung Ifanatul Mustafida
NIM 150910301011**

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI
(BPNT) DI DESA KAJARHARJO KECAMATAN KALIBARU
KABUPATEN BANYUWANGI

SKRIPSI

Oleh :
Nunung Ifanatul Mustafida
NIM 150910301011

JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019

PERSEMBAHAN

Penulis dengan rasa syukur dan bangga menyelesaikan serta mempersembahkan karya tulis sederhana ini kepada :

1. Ayahanda Sumarno dan Ibunda Fulaniyah yang dengan sabar menyemangati, mengingatkan, memotivasi dan mendidik penulis sejak kecil hingga dewasa, dengan doa dan pengorbanan yang sangat besar.
2. Adik tersayang Muhammad Naufal Hafidz Baachtiar, serta keluarga yang selalu memberikan dukungan dan doa.
3. Kakakku Moh. Rizqi Agusta yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
4. Teman-teman Elia Devi, Febriana, Fingky Agustin dan Yesi Diana yang selalu membantu dalam setiap proses.
5. Guru-guruku baik sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi maupun guru pendidikan formal yang memberikan ilmu dan menanamkan nilai-nilai kebaikan bagi penulis.
6. Almamater Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Menjadi sebuah pengalaman yang tidak tergantikan.

MOTTO

“karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.”

(Terjemahan QS. Al-Insyirah : 5-7)¹



¹ Alfatih.2013. *The Qur'an Al Fath*. PT Insan Media Pusaka: Jakarta

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nunung Ifanatul Mustafida

NIM : 150910301011

Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Juli 2019

Yang menyatakan

Nunung Ifanatul Mustafida

NIM. 150910301011

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)
DI DESA KAJARHARJO KECAMATAN KALIBARU KABUPATEN
BANYUWANGI**

Oleh

Nunung Ifanatul Mustafida

NIM 150910301011

Dosen Pembimbing

Kris Hendrijanto, S.Sos., M.Si

NIP. 197001031998021001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi” telah di uji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada :

Hari, tanggal : Selasa, 18 Juni 2019

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
NIP. 196106081988021001

Kris Hendrijanto, S.Sos, M.Si
NIP. 197001031998021001

Anggota I

Anggota II

Dr. Franciscus Adi P., M.Si
NIP. 197309092008121002

Belgis Hayvinatun N., S.Sos., M.Kesos
NIP. 198904232018032001

Mengesahkan
Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik
Universitas Jember

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
NIP. 196106081988021001

RINGKASAN

“Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi”; Nunung Ifanatul Mustafida, 150910301011; 2019; 160 halaman; Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Bantuan Pangan Non Tunai merupakan program baru pengganti dari program Rastra. Tujuan Program BPNT sebenarnya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan digunakan untuk memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat atau yang biasa disingkat dengan KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan. Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang sudah melakukan dan menjalankan program pemerintah yang baru yaitu BPNT. Jumlah yang menerima program BPNT di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 101.626 KPM, dengan jumlah murni BPNT adalah 63.371 KPM. Jumlah KPM tersebut adalah penerima Rastra pada program sebelumnya. Kemudian 38.255 KPM yang merupakan penerima program keluarga harapan (PKH) yang telah diverifikasi dan dinilai berhak memperoleh BPNT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Kajarharjo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive* dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi adalah Implementasi program BPNT sudah sesuai dengan buku panduan program BPNT tahun 2018. Meskipun dalam proses penyaluran program masih memiliki beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat maupun KPM, Kurangnya *E-warong*. Akan tetapi program BPNT memberikan dampak dan manfaat yang baik untuk kesejahteraan masyarakat khususnya KPM. Akan tetapi bagi sebagian KPM juga memberikan dampak ketergantungan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, secara umum dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program BPNT di Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi, yaitu: Program BPNT merupakan program pelayanan sosial dari pemerintah untuk masyarakat miskin. Implementasi dari program BPNT sudah sesuai dengan buku panduan program BPNT tahun 2018. Meskipun dalam proses penyaluran program masih memiliki beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi kepada KPM, kurangnya *E-warong* dan kurangnya koordinasi antar pendamping BPNT. Selain itu program BPNT memberikan dampak dan manfaat yang baik untuk kesejahteraan masyarakat khususnya KPM.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi” skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Kris Hendrijanto, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi dan dosen dosen pembimbing akademik yang telah dengan sabar membimbing saya hingga terselesainya skripsi.
3. Dr. Pairan, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial.
4. Seluruh dosen program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes, Dr. Franciscus Adi P., M.Si, Belgis Hayyinatun N., S.Sos., M.Kesos sebagai tim penguji.
6. Staf akademik dan kemahasiswaan atas bantuan untuk kelancaran penulis terutama kepada Mas Riski selaku operator jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial.
7. Seluruh perangkat Desa Kajarharjo, pendamping program BPNT dan PKH serta seluruh masyarakat Desa Kajarharjo yang telah membantu penulis mendapatkan data selama peneliti melakukan penelitian.
8. Sahabat dan teman teman seperjuangan jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial 2015 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
9. Teman-teman KKN 240 Desa Curah Kalak Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo
10. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan, partisipasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis menjadi amal baik dan mendapatkan balasan Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

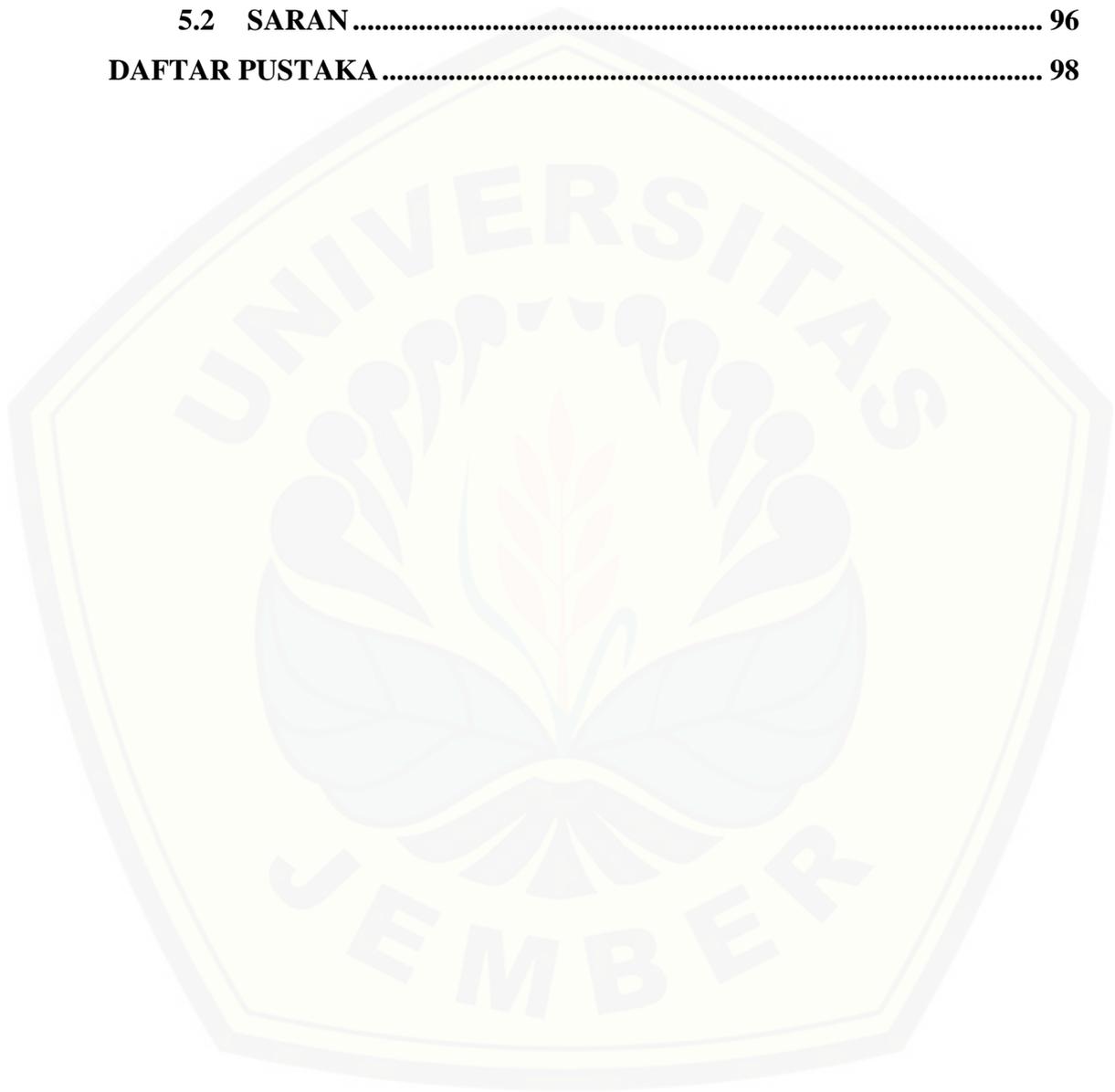


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Konsep Kebijakan	7
2.2 Konsep Kemiskinan	10
2.3 Konsep Perlindungan Sosial.....	13
2.4 Konsep Pelayanan Sosial	18
2.5 Konsep Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	21
2.6 Konsep Implementasi Program	28
2.7 Konsep Kesejahteraan Sosial	32
2.8 Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu	34
2.9 Kerangka Berfikir	37

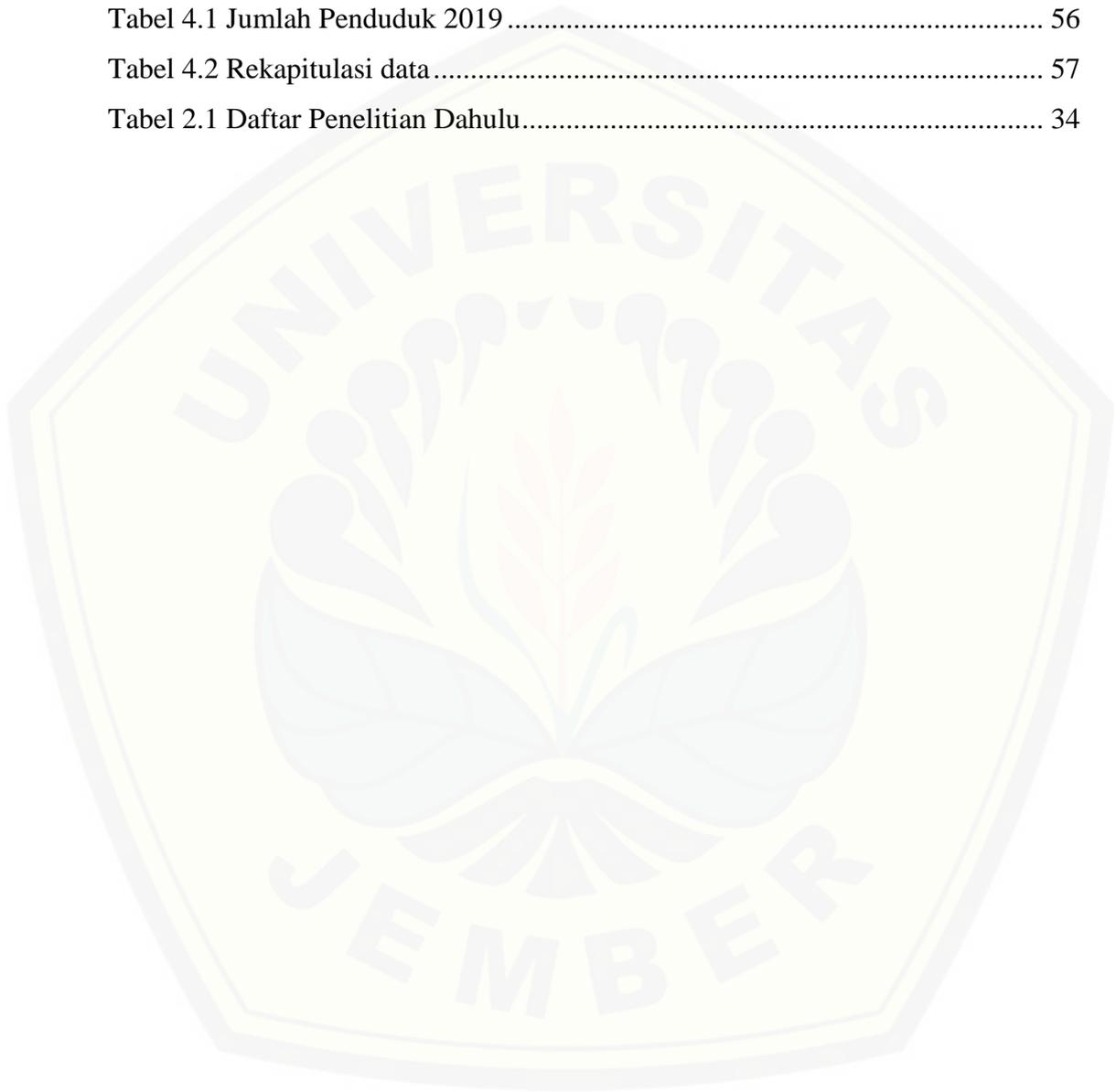
BAB 3 METODE PENELITIAN	41
3.1. Pendekatan Penelitian	41
3.2. Jenis Penelitian	42
3.3. Lokasi Penelitian	43
3.4. Teknik Penentuan Informan	44
3.4.1 Informan Pokok	44
3.4.2 Informan Tambahan	46
3.5. Teknik Pengumpulan Data	48
3.5.1 Observasi	48
3.5.2 Wawancara	52
3.5.3 Dokumentasi	54
3.6 Teknik Analisis Data	54
3.7 Teknik Keabsahan Data	56
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	58
4.1 Hasil Penelitian	58
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
4.1.2 Program BPNT	60
4.1.2.1 Persiapan.....	61
4.1.2.2 Edukasi dan Sosialisasi.....	64
4.1.2.3 Registrasi dan/atau Pembukaan Rekening Penerima Kartu Kombo	66
4.1.2.4 Penyaluran	68
4.1.2.5 Pemanfaatan.....	70
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	71
4.2.1 Pembahasan Teori dan Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai	72
4.2.1.1 Persiapan.....	72
4.2.1.2 Edukasi dan Sosialisasi.....	79
4.2.1.3 Registrasi dan/atau Pembukaan Rekening Penerima Kartu Kombo	82
4.2.1.4 Penyaluran	85

4.2.1.5 Pemanfaatan.....	88
4.2.2 Pembahasan Program Bantuan Pangan Non Tunai	90
BAB 5. PENUTUP.....	96
5.1 KESIMPULAN.....	96
5.2 SARAN	96
DAFTAR PUSTAKA	98



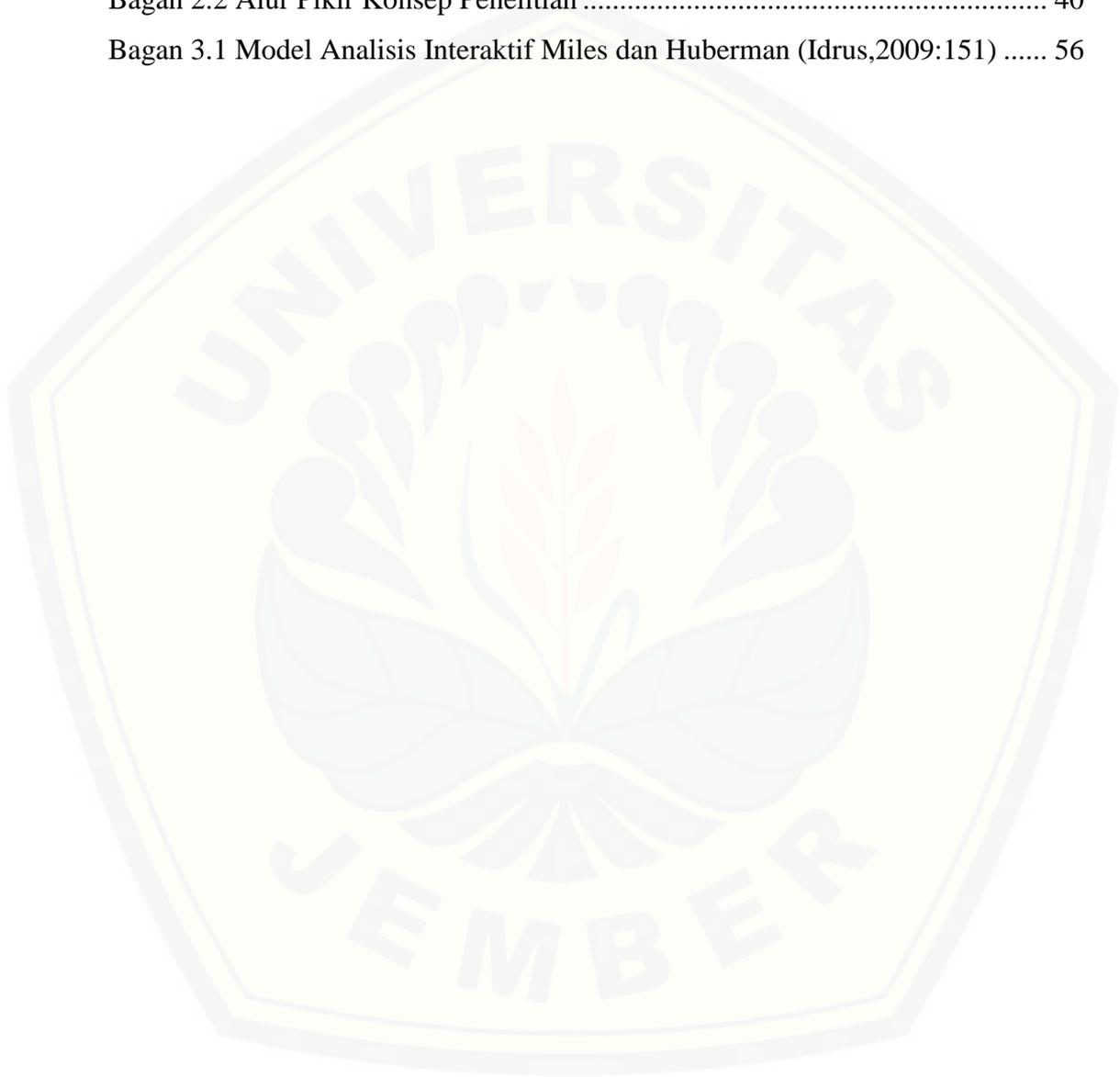
DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Daftar Penelitian Dahulu.....	34
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk 2019	56
Tabel 4.2 Rekapitulasi data.....	57
Tabel 2.1 Daftar Penelitian Dahulu.....	34



DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1 Perlindungan Sosial, Suharto, Edi (2013:41).....	13
Bagan 2.2 Alur Pikir Konsep Penelitian	40
Bagan 3.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman (Idrus,2009:151)	56



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A. *Guide Interview*

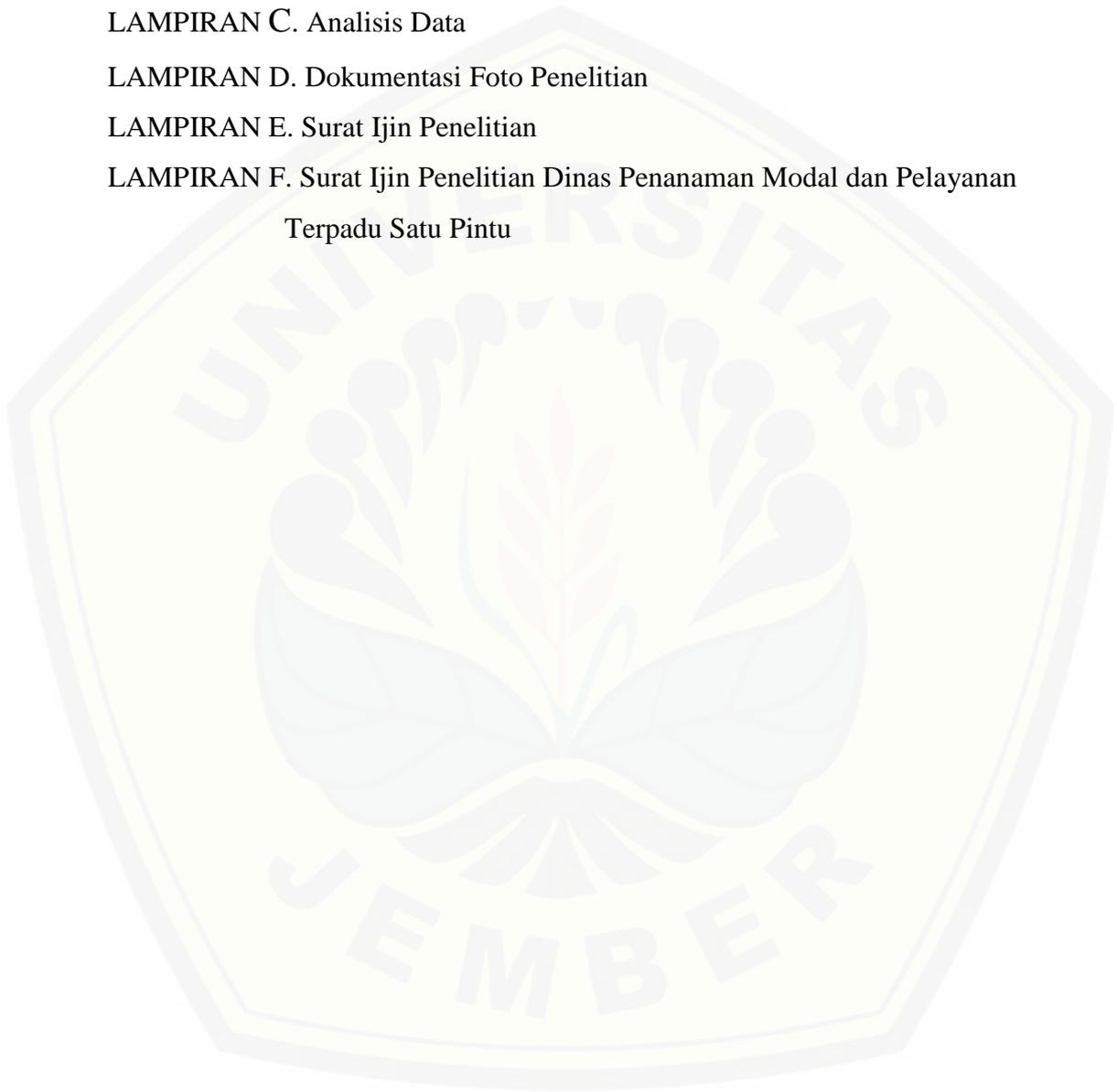
LAMPIRAN B. Transkrip Wawancara

LAMPIRAN C. Analisis Data

LAMPIRAN D. Dokumentasi Foto Penelitian

LAMPIRAN E. Surat Ijin Penelitian

LAMPIRAN F. Surat Ijin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu





DAFTAR SINGKATAN

B

BPNT Bantuan Pangan Non Tunai

BUMN Badan Usaha Milik Negara

K

Kg Kilogram

KPM Keluarga Penerima Manfaat

G

GNNT Gerakan Nasional Non Tunai

P

Perpres Peraturan Presiden

Permensos Peraturan Menteri Sosial

PKH Program Keluarga Harapan

PMKS Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

S

SNKI Strategi Nasional Keuangan Inklusif

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan sosial adalah menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkan kualitas hidup manusia melalui pemberian program tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya. Menurut Bassant, Watts, Dalton dan Smit (dalam Suharto Edi 2008). Dalam suatu pemerintahan kebijakan merupakan suatu hal yang sangat penting, karena kebijakan dapat memberikan dampak yang baik bagi warga negara Indonesia. Oleh karena itu dalam suatu pemerintahan kebijakan harus berjalan dengan baik. Macam-macam kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah adalah kebijakan keuangan, kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan lain sebagainya.

Kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat sebagai upaya untuk meningkan kualitas hidup manusia melalui pemberian program tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya. Selain itu kebijakan sosial memiliki fungsi preventif (penegahan), kuratif (penyembuhan) dan pengembangan (developmental).

Dalam kaitannya, kebijakan sosial hadir sebagai cara untuk memecahkan masalah sosial bagi semua golongan masyarakat yang mempermudah dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menanggapi suatu perubahan sosial. Dengan demikian, tidak dapat diragukan lagi bahwa kebijakan sebagai suatu fasilitas pemenuhan kebutuhan, pemerataan, penyedia lapangan pekerjaan, peningkatan keadilan sosial yang harus dilandasi dengan pelayanan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan salah satu faktor pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan. Kemiskinan dapat dikatakan suatu kondisi dimana masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk mencapai kesejahteraan. Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang ada sejak lama. Pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran

perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen), berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen). Data kemiskinan tersebut menurut BPS selama periode bulan maret sampai dengan bulan september 2017. (Badan Pusat Statistik: 2017 <https://www.bps.go.id/>)

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia dapat diatasi oleh pemerintah yaitu dengan menjalankan kebijakan yang telah direncanakan. Seperti kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang menyatakan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan meliputi: kebijakan pemenuhan hak-hak dasar dan kebijakan pembangunan wilayah untuk mendukung pemenuhan hak dasar. Hak dasar tersebut dapat diberikan pemerintah sebagai bentuk usaha pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Salah satu program yang dikeluarkan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan adalah memberikan perlindungan bagi masyarakat melalui bantuan sosial program penyaluran beras untuk keluarga miskin.

Program penyaluran beras untuk keluarga miskin yang selanjutnya disingkat dengan Raskin. Program tersebut adalah sebuah upaya untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial beras murah dengan jumlah maksimal 15 kg setiap rumah tangga miskin dan setiap bulan dengan masing-masing seharga Rp. 1600,00 per kg (netto) di titik distribusi.

Program Raskin merupakan subsidi pangan yang diperuntukan bagi keluarga miskin sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan untuk keluarga miskin. Penyaluran Raskin (bantuan beras bersubsidi bagi masyarakat miskin) sudah dimulai sejak tahun 1998. Pada tahun 2015 menteri sosial RI Khofifah Indar Parawasa mengganti nama Program pemerintah Raskin menjadi program beras sejahtera. Program beras sejahtera yang selanjutnya disingkat dengan Rastra. Perubahan nama program Raskin menjadi Rastra adalah untuk mengubah pemikiran masyarakat yang sebelumnya mengidentikan beras ini

untuk membantu masyarakat miskin, menjadi beras yang bersubsidi yang digunakan untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Selain melakukan perubahan nama program, kementerian sosial juga mengubah konsep program bantuan dimana pada awalnya dalam penyaluran dipungut biaya menjadi tidak dipungut biaya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Selanjutnya pada tahun 2018 muncul peraturan menteri yaitu Permensos No. 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan NonTunai. Program penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yang biasa disingkat dengan BPNT merupakan program baru pengganti dari program Rastra. Inisiatif penyaluran bantuan pangan secara non tunai yang dilaksanakan pada tahun 2017 baru dilakukan pada Kota terpilih yang memiliki akses dan fasilitas memadai, sedangkan sisanya masih menggunakan pola natura (Rastra). Tujuan Program BPNT sebenarnya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan digunakan untuk memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan.

Program BPNT memiliki manfaat bagi keluarga penerima manfaat yaitu meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), Meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil dibidang perdagangan.

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang sudah melakukan dan menjalankan program pemerintah yang baru yaitu BPNT. Jumlah yang menerima program BPNT di Kabupaten Banyuwangi

sebanyak 101.626 KPM, dengan jumlah murni BPNT adalah 63.371 KPM. Jumlah KPM tersebut adalah penerima Rastra pada program sebelumnya. Kemudian 38.255KPM yang merupakan penerima program keluarga harapan (PKH) yang telah diverifikasi dan dinilai berhak memperoleh BPNT.

Program BPNT yang diberikan kepada KPM berbentuk kartu dan bisa digunakan untuk mendapatkan berbagai bahan makanan pokok di warung tertentu. Warung tersebut bernama *e-warong*. Keluarga penerima ini akan menerima transfer setiap bulan uang sebesar Rp.110.000 yang dimasukkan dalam kartu keluarga sejahtera. Kartu keluarga sejahtera yang biasa disingkat dengan KKS.

Kabupaten Banyuwangi termasuk Kabupaten yang dapat dikatakan berhasil dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penerima bantuan setiap tahun mengalami penurunan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan terbaru Kabupaten Banyuwangi menurun dibandingkan tahun lalu. Angka kemiskinan di kabupaten di ujung Timur Jawa ini turun menjadi 8,79 persen pada tahun 2017. Tahun 2016 tercatat angka kemiskinan 9,17 persen. (Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi; <https://www.banyuwangikab.go.id>).

Kabupaten Banyuwangi termasuk Kabupaten yang pertama kali yang menjalankan program BPNT dibandingkan Kabupaten Jember dan Pulau Madura. Selain itu untuk Desa Kajarharjo merupakan Desa yang berada di Kecamatan di perbatasan. Desa Kajarharjo Kabupaten Banyuwangi termasuk desa yang memiliki 6 Dusun. Desa Kajarharjo termasuk Desa terbanyak penerima BPNT di Kecamatan Kalibaru. Penerima manfaat program BPNT sebanyak 1.122 KPM di Desa Kajarharjo dari jumlah keseluruhan 4.672 KPM di Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi. Maka dari itu peneliti tertarik meneliti implementasi program BPNT di Desa Kajarharjo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas fenomena yang terjadi adalah adanya suatu program dari pemerintah yaitu bantuan pangan non tunai (BPNT). Dalam hal ini peneliti ingin meneliti tentang implementasi dari

program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dengan demikian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi dari program pemerintah yaitu bantuan pangan non tunai di Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang ingin dicapai yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, terdapat tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kajarharjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Bagi Akademisi:

Bagi disiplin ilmu kesejahteraan sosial dapat memberikan pemahaman serta pengetahuan yang dapat digunakan dengan memperkaya studi mengenai implementasi program bantuan non tunai yang dilaksanakan oleh pemerintah

b. Bagi Praktisi

Sebagai masukan bagi pemerintah dan pelaksana program BPNT (bantuan pangan non tunai) bahwa implementasi program dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat adalah untuk mengetahui manfaat dari program BPNT untuk KPM.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan peninjauan kembali yang berkaitan dengan judul tersebut. Tinjauan pustaka berfungsi mereview dari laporan-laporan penelitian yang terdahulu. Kemudian tinjauan teori juga berfungsi untuk membangun teori dalam sebuah penelitian, maka dari itu peneliti harus menghubungkan antara fenomena dengan teori-teori yang berkaitan dengan judul tersebut. Dalam suatu penelitian ilmiah, kajian teori menjadi suatu hal yang sentral sebagai konsep dasar maupun kerangka acuan yang hendak dilaksanakan. Menurut Irawan (2006: 38) kerangka teoritis merupakan penjelasan ilmiah tentang konsep-konsep kunci yang akan digunakan dalam penelitian, termasuk kemungkinan berbagai keterkaitan antara satu konsep dengan konsep lain .

Dalam bukunya, Erwan dan Dyah (2007) menjelaskan bahwa teori adalah serangkaian konsep yang memiliki hubungan sistematis untuk menjelaskan suatu fenomena sosial tertentu. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa teori merupakan salahsatu hal yang paling fundamental yang harus dipahami seorang peneliti ketika melakukan penelitian karena dari teori-teori yang ada peneliti dapat menemukan dan merumuskan permasalahan sosial yang diamatinya secara sistematis untuk selanjutnya dikembangkan dalam bentuk hipotesis-hipotesis penelitian.

Program bantuan pangan non tunai merupakan program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Program bantuan pangan non tunai yang biasa di singkat program BPNT dapat dikatakan sebagai pembangunan. Secara umum pembangunan adalah usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dengan memberikan prioritas utama pada masyarakat miskin pada pelaksanaan program pembangunan. Tujuan pembangunan sosial sendiri adalah tercapainya kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan kualitas hidup dan terpenuhinya kebutuhan dasar.

Dalam hal ini implementasi program BPNT dapat dikaji menggunakan konsep-konsep yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Konsep tersebut antara lain konsep kebijakan, konsep kemiskinan, konsep perlindungan

sosial dalam program bantuan pangan non tunai (BPNT), konsep pelayanan sosial, konsep implementasi, konsep kesejahteraan sosial.

2.1 Konsep Kebijakan

Menurut Friedrich sebagaimana dalam Leo Agustino (2008:7), kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan, terutama dalam kaitan adanya peran fungsional Pemerintah di ranah publik sebagai pelayan masyarakat.

Carl J. Friedrich mengatakan kebijakan pemerintah adalah suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan, atau Pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-kesempatannya, yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut di dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak serta suatu tujuan tertentu. (Soenarko, 2003:42)

Kebijakan sosial menurut Suharto (2014:82) adalah seperangkat tindakan (*course of action*), kerangka kerja (*framework*), petunjuk (*guideline*), rencana (*plan*), peta (*map*), atau strategi yang direncanakan untuk menterjemahkan visi politis pemerintah atau lembaga pemerintah kedalam program dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang kesejahteraan sosial.

Dalam membahas kebijakan sosial, diperlukan pemahaman mengenai tujuan-tujuan dari pembangunan dan juga kehidupan banyak orang. Kemudian dalam menentukan suatu kebijakan sosial diperlukan berbagai pertimbangan sosial yang nantinya dapat mendorong atau menghambat. Menurut Midgley dalam Suharto (2013:11) yang berfungsi untuk menentukan kategori suatu kebijakan sosial yang dibuat, diantaranya yaitu:

1. Peraturan dan perundang-undangan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, yang diwujudkan dalam peraturan dan perundang-undangan sebagai payung hukum untuk menjamin suatu

program yang dilakukan baik disektor pendidikan, kesehatan, huku, sosial, ataupun hal lain yang berkaitan dengan pihak swasta sebagai mitra pemerintah dan lain-lain.

2. Program pelayanan sosial merupakan kebijakan yang diterapkan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat yang berupa bantuan barang, tunjangan uang, perluasan kesempatan, perlindungan sosial, dan bimbingan sosial yang bersifat residual.
3. Sistem perpajakan, berfungsi untuk menandai segala program yang dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud dari kebijakan sosial yang telah direncanakan atau bisa disebut dengan kesejahteraan fiskal.

Berdasarkan kategori diatas dapat disimpulkan bahwa setiap perundang-undangan, hukum ataupun peraturan daerah yang menyangkut masalah dan kebijakan sosial berbentuk undang-undang.

Kebijakan sosial merupakan salah satu bentuk dari kebijakan publik, karena memiliki tujuan yang berkaitan dengan kepentingan kehidupan masyarakat, namun berorientasi pada kesejahteraan sosial. Sehingga dalam melihatnya terdapat tiga sudut pandang menurut (Huttman, 1981, Gilbert dan Specht, 1986) dalam Suharto (2014:11) yakni kebijakan sosial sebagai produk (*product*) dan sebagai kinerja atau capaian (*performance*). Sebagai proses untuk mencapai suatu kebijakan diperlukan sebuah proses dan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pembuat kebijakan, baik yang berkaitan dengan perencanaan atau *need assesment* terhadap penerima atau sasaran dari kebijakan tersebut, alternatif-alternatif tindakan lain yang diperlukan agar kebijakan dapat diterima dan strategi-strategi kebijakan ataupun pengimplementasian kebijakan. Sebagai suatu produk kebijakan sosial dilihat dari apa yang telah dihasilkan atau diberikan pemerintah kepada masyarakat melalui perumusan dan perencanaan sosial yang telah disusun. Produk dalam hal ini dapat berupa keluaran baik melalui undang-undang yang disahkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program. Sebagai suatu kinerja atau capaian, kebijakan memutuskan pada implementasi dari produk atau capaian tujuan suatu rencana yang tertulis, sehingga kinerja dalam hal ini melihat pada dampak yang telah dihasilkan dan dirasakan oleh masyarakat.

ataupun menyangkut penilaian dari kebijakan yang telah diterapkan sehingga dapat diketahui sisi positif dan negatif.

M. Irfan Islamy (2002:102) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu :

1. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan pemerintahan;
2. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;
3. Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itupun mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu;
4. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditunjukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan. Menurut Bassant, Watts, Dalton dan Smit (dalam Suharto Edi 2008): secara singkat kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkan kualitas hidup manusia melalui pemberian program tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya. Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan sosial memiliki fungsi preventif (pencegahan), dan kuratif (penyembuhan), dan pengembangan (developmental). Kebijakan sosial adalah ketetapan yang desain secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah social (fungsi preventif) mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif) dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (state obligatiaon) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya (Suharto, 2006).

Berdasarkan penjelasan diatas maka kebijakan sosial sebagai bentuk kebijakan publik yang memiliki beberapa proses perumusan sehingga dalam implementasi program memerlukan sudut pandang yang bisa digunakan untuk melihat secara utuh proses yang terjadi. Sehingga dengan alur yang jelas maka

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai suatu kebijakan sosial, seperti kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Presiden No 63 Tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 muncul kebijakan yaitu Peraturan Menteri N0. 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

2.2 Konsep Kemiskinan

Secara harfiah kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang berarti “tidak memiliki harta benda”. Secara luas kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidak mampuan baik secara individu, keluarga maupun kelompok. Sehingga dengan kondisi seperti ini akan sangat rentan timbulnya masalah sosial lainnya. Menurut Mubyarto (2003:45) kemiskinan adalah golongan yang rawan pangan yang berpengaruh negatif terhadap produktifitas kerja dan angka kematian balita. Salim dan Mubyarto (2003:27) juga mendefinisikan golongan kemiskinan adalah mereka yang berpendapatan rendah, karena rendahnya produktifitas disebabkan oleh:

- a. Tidak memiliki set produksi
- b. Lemah jasmani dan rohani.

Kriteria miskin merupakan ukuran yang menjadi dasar penilaian. Kriteria miskin menurut standar BPS ada 14 kriteria. Masyarakat dapat dikatakan miskin apabila memenuhi kriteria tersebut yaitu minimal 9 variabel. 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dapat dikatakan miskin. Kriteria miskin tersebut dapat dijabarkan diantaranya adalah:

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang.
- b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu /kayu murahan.
- c. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama sama dengan rumah tangga lain.
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan.

- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
- h. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam satu minggu.
- i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam satu tahun.
- j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
- l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.
- m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/ tamat SD.
- n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang model lainnya.

Simanjuntak dalam Mubyarto (2003:53) menjelaskan bahwa kemiskinan menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer seperti makan, pakaian, perumahan, kesehatan dengan memadai. Dengan adanya pendapat para ahli, kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan dimana seseorang tidak mampu memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok. Kemiskinan tidak dapat dilihat dari faktor ekonomi saja melainkan dapat dilihat dari faktor sosial dan psikologi. Kemiskinan faktor ekonomi masyarakat dapat dilihat apabila masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, yang dapat dikatakan krisis atau perekonomiannya yang sangat rendah maka seseorang tersebut di katakan sebagai masyarakat yang tergolong miskin. Kemiskinan itu sendiri menurut Lavitan dalam Ninik Sudarwati (Kebijakan Pengentasan Kemiskinan, 2009. 23), “kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak”. Menurut Supardi Suparlan dalam bukunya yang berjudul Kemiskinan di Perkotaan (1984).12), pengertian kemiskinan adalah: Suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau

segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Kemiskinan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kelompok sesuai dengan pemahaman atas kondisi kemiskinan yang dihadapi (krisnamurthi, 2006), yaitu:

1. Kemiskinan absolut, kemiskinan yang terjadi bila seseorang, keluarga, atau masyarakat yang tingkat pendapatan atau pengeluarannya berada di bawah suatu batas minimal tertentu untuk dapat hidup layak sebagai manusia. Batas tersebut disebut garis kemiskinan.
2. Kemiskinan relatif, kemiskinan yang terjadi jika seseorang, sekeluarga, atau masyarakat yang tingkat pendapatannya atau pengeluarannya relatif lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan atau pengeluaran masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan Kronis (chronic) atau struktural, kemiskinan ini terjadi jika kondisi kemiskinan ini yang terjadi terus menerus dalam jangka waktu yang lama.
4. Kemiskinan sementara (transitory) atau accidental, kemiskinan ini terjadi akibat adanya perubahan atau 'shock' yang mengakibatkan seseorang atau sekeluarga atau masyarakat berubah dari tidak miskin menjadi miskin.
5. Kemiskinan masal, terjadi jika sebagian besar dari masyarakat mengalami kemiskinan.
6. Kemiskinan individual, yaitu kemiskinan yang terjadi jika hanya beberapa orang atau sebagian kecil masyarakat yang mengalami kemiskinan.

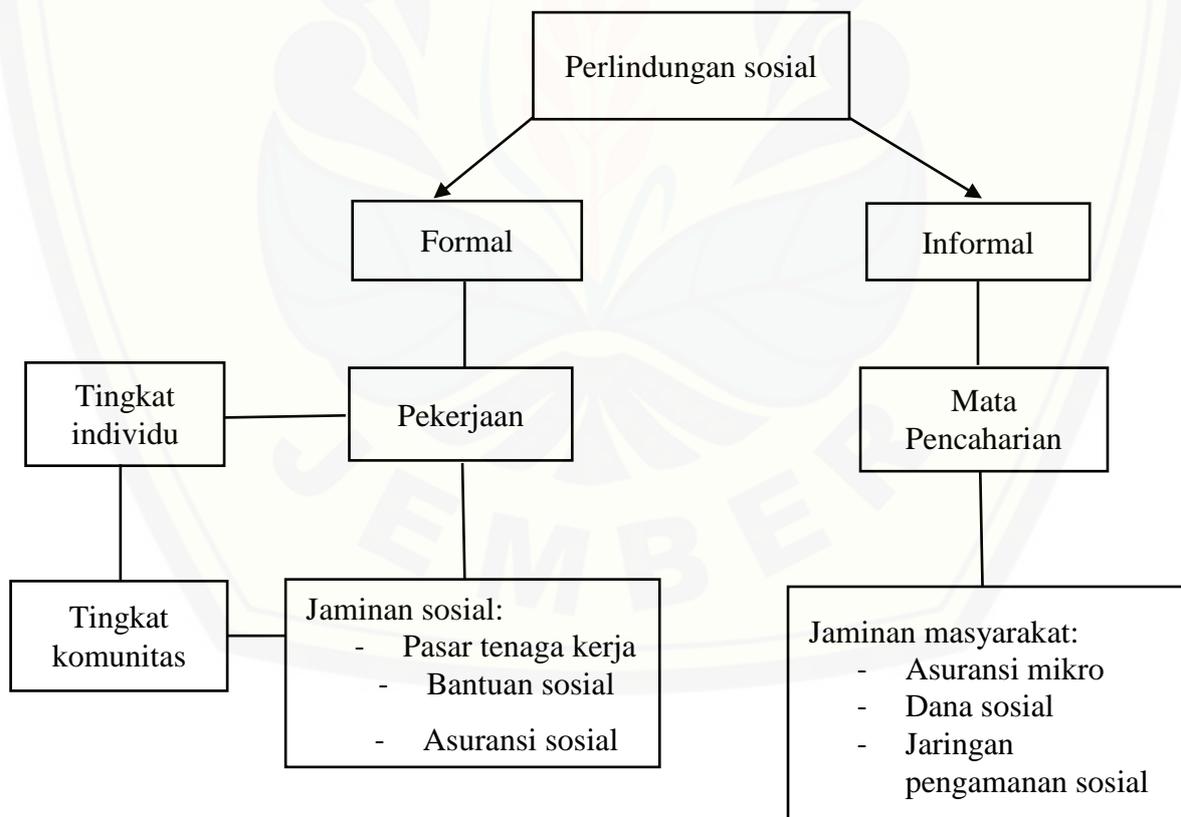
Menurut Ahmadi Abu (2009:326) Kemiskinan diartikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Kemiskinan

menyebabkan terjadinya daya beli masyarakat rendah dan masyarakat tidak dapat memenuhi nutrisi keluarganya secara baik. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan dapat diatasi dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Seperti kebijakan yang berbentuk program. Program tersebut dinamakan dengan program bantuan pangan non tunai (BPNT).

2.3 Konsep Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial merupakan suatu bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam resiko, kerentanan dan kesengsaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. (dalam Edi Suharto, 2013).

Bagan 2.1 Perlindungan Sosial, Edi Suharto (2013:41)



Perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam strategi kebijakan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan serta memperkecil kesenjangan

multidimensi (Suharto, 2008). Dalam arti luas, perlindungan sosial mencakup seluruh tindakan baik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat guna melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan resiko serta meningkatkan status sosial.

Perlindungan sosial mencakup lima elemen utama yakni pasar tenaga kerja, asuransi sosial, bantuan sosial, skema mikro dan berbasis komunitas, serta perlindungan anak (ADB,2005; Suharto 2009). Jika diimplementasikan secara tepat dan terintegrasi dengan pembangunan ekonomi dan sosial dalam arti luas maka skema-skema perlindungan sosial tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Dalam hal ini perlindungan sosial dapat meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui investasi modal manusia, peningkatan produktivitas dan pengurangan kerentanan warga negara terhadap beragam resiko yang mengancam kehidupannya (Shepherd, Marcus dan Barrientos, 2004; Suharto, 2009b)

1. Pasar tenaga kerja

Pekerjaan merupakan pada dasarnya perlindungan sosial yang penting bagi setiap individu. Pekerjaan sosial harus menyentuh aspek pekerjaan. Dalam hal ini sasaran utamanya adalah populasi usia kerja, baik yang bekerja dalam sektor formal maupun informal, menganggur atau setengah menganggur.

2. Asuransi sosial

Asuransi sosial merupakan skema perlindungan sosial yang diterima seseorang berdasarkan kontribusinya yang berupa prem, iuran atau tabungan. Program ini mampu mengurangi resiko melalui penyediaan tunjangan penghasilan dalam situasi sakit, cacat, kecelakaan kerja, melahirkan, menganggur, semakin tua dan kematian. Program asuransi sosial mencakup :

- a. Asuransi atau tunjangan pengangguran untuk menghadapi keadaan tidak adanya kesempatan kerja akibat faktor struktural maupun situasional

- b. Asuransi kecelakaan kerja untuk memberi kompensasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan atau sakit terkait pekerjaannya
- c. Asuransi kecacatan atau ketidakmampuan kerja yang biasanya dikaitkan dengan pensiun hari tua atau memberi kompensasi sebagian atau seluruh kerugian akibat kecacatan
- d. Asuransi kesehatan untuk melindungi orang dari penyakit atau dari kehilangan pendapatan atau aset akibat mengalami sakit
- e. Asuransi hari tua untuk memberikan tunjangan penghasilan setelah pensiun
- f. Asuransi kelangsungan hidup yang dapat menjamin keluarga atau anak-anak yang menjadi tanggungan dapat hidup layak akibat pencari nafkah utama meninggal atau kehilangan penghasilan akibat kecacatan permanen

3. Bantuan sosial

Bantuan sosial atau yang kerap disebut juga sebagai bantuan publik dan pelayanan kesejahteraan mencakup tunjangan uang, barang atau pelayanan sosial yang ditujukan untuk membantu atau melindungi individu, keluarga dan komunitas yang paling rentan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Program-program bantuan sosial mencakup berbagai jenis tindakan publik yang didesain untuk mentransfer sumber-sumber kepada orang-orang yang memenuhi syarat yakni mereka yang lemah dan rentan seperti anak-anak, korban perang atau korban bencana alam atau sosial dan ODKK. Bentuk bentuk bantuan sosial yang yang wajib dipenuhi oleh negara:

- a. Transfer uang atau barang seperti bantuan langsung tunai (BLT), kupon makanan atau pemberian kursi roda, tongkat dan komputer braille bagi penyandang cacat.
- b. Pelayanan sosial atau kesejahteraan yang berupa konseling, penyuluhan program BOS atau PKH yang memajukan transfer

uang dan perluasan akses terhadap pelayanan kesehatan atau pendidikan

- c. Subsidi temporer seperti raskin, minyak tanah bersubsidi, bantuan uang muka atau perumahan dan penjualan sembako murah dimasa krisis
- d. Skema pengamanan sosial yakni pengamanan yang diberikan kepada kelompok-kelompok rentan menyusul adanya dampak-dampak negatif jangka pendek akibat diterapkan suatu kebijakan. Skema ini terkait dengan pemberian BLT, minyak tanah bersubsidi atau sembako murah menyusul kebijakan pengurangan subsidi BBM.

4. Skema mikro dan berbasis komunitas

Skema mikro dan berbasis komunitas memberi perlindungan terhadap sekelompok orang. Tujuannya untuk merespon kerentanan dalam skala komunitas. Pada awalnya program-program ini dikembangkan untuk memberikan perlindungan dan jaminan bagi petani di pedesaan dan pekerja sektor informal di perkotaan. Ada beberapa bentuk perlindungan sosial mikro dan berbasis komunitas:

- a. Asuransi mikro
 - b. Asuransi pertanian
 - c. Dana sosial berbasis masyarakat
 - d. Manajemen kebencanaan
- #### 5. Perlindungan anak

Ada beberapa kebijakan perlindungan anak yang bisa dikembangkan antara lain:

- a. Program pengembangan anak usia dini untuk menjamin perkembangan psikomotor dan mental anak melalui perbaikan gizi, makanan tambahan, pencegahan penyakit, beasiswa, tunjangan pendidikan, pelatihan ketrampilan khusus
- b. Bantuan sosial keluarga melalui pemberian bantuan uang, barang atau pelayanan rawat anak

- c. Advokasi sosial melalui kampanye dan peningkatan kesadaran masyarakat, dunia usaha dan lembaga-lembaga pelayanan.

Tantangan utama yang harus di hadapi oleh Negara Indonesia adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk menjamin inklusi kelompok miskin, anak-anak dan generasi muda yang berada di dalam proses pembangunan. Namun demikian, memacu pertumbuhan ekonomi saja belum merupakan kondisi yang cukup untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan.

Penduduk pada umumnya, terutama rumah tangga dan individu-individu yang rentan, senantiasa menghadapi berbagai resiko yang dapat mendorong kedalam kemiskinan dan kesengsaraan. Negara dan masyarakat harus mengambil langkah-langkah strategis untuk mengurangi kerentanan mereka dan merespon akibat-akibat buruk manakala guncangan terjadi. Secara umum empat jenis resiko yang sering dihadapi oleh orang miskin menurut perlindungan sosial formal maupun non formal:

- a) Resiko yang terkait dengan siklus kehidupan, seperti menjadi tua, kecacatan, kematian
- b) Ekonomi, seperti tidak bisa bekerja, kehilangan pekerjaan, pendapatan rendah
- c) Lingkungan hidup, seperti banjir, gempa bumi, kebakaran
- d) Tata pemerintahan atau sosial, seperti deskriminasi, korupsi, kejahatan, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakstabilan politik.

Dalam pembukaan dan pasal 27 dan 34 UUD 1945 dan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial) menjamin bahwa negara memberikan perlindungan sosial bagi seluruh warganya, lebih-lebih mereka yang terlantar dan miskin. Namun demikian dilihat dari kepesertaan perlindungan sosial formal, yakni jaminan sosial, ada sekitar 60 persen penduduk Indonesia yang tidak tercakup oleh satupun skema jaminan kesehatan, pensiun, kecelakaan kerja maupun kematian (Suharto,2009)Kemudian dalam hal ini tujuan utama dalam perlindungan sosial adalah:

- a. Mencegah dan mengurangi resiko yang dialami manusia sehingga terhindar dari kesengsaraan yang parah dan berkepanjangan,
- b. Meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan, kesengsaraan dan ketidakamanan sosial
- c. Memungkinkan kelompok-kelompok miskin untuk memiliki standar hidup yang bermartabat sehingga kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya.

Perlindungan sosial merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi masyarakat. pemerintah dalam melindungi masyarakat dapat melalui kebijakan program yang telah di rencanakan. Program tersebut berupa program BPNT. Program BPNT merupakan suatu program yang berbentuk perlindungan sosial. Dimana program BPNT termasuk kedalam salah satu elemen dari lima elemen perlindungan sosial. Program BPNT termasuk kedalam elemen bantuan sosial. Bantuan sosial bertujuan untuk melindungi atau membantu individu, keluarga dan komunitas yang rentan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari kebijakan program yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program BPNT, yang termasuk kedalam program yang tidak berbayar.

2.4 Konsep Pelayanan Sosial

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan (Lukman, 2000:8). Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai cara atau hasil pekerjaan melayani.

Pelayanan sosial disebut juga sebagai pelayanan kesejahteraan sosial. Menurut Walter Friedlander, kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari usaha-usaha sosial dan lembaga-lembaga sosial yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai relasi perseorangan dan sosial yang

dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan secara penuh, serta mempertinggi kesejahteraan selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat (Wibhawa dkk, 2010 : 24).

Isbandi Rukminto (2005:114) mengemukakan pelayanan sosial merupakan suatu bentuk usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi sosial yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan komunikasi antara klien dan lembaga melalui upaya penjangkauan. Pengembangan berbagai saluran informasi informasi dengan klien dan pengembangan skema advokasi diri yang memungkinkan para penerima pelayanan sosial tersebut menjangkau berbagai layanan secara lebih bebas dan merata.

Menurut Kahn yang dikutip Fahrudin (2012:13) pelayanan sosial personal adalah sebagai berikut: Pelayanan sosial personal atau pelayanan social umum adalah program-program yang melindungi atau mengembalikan kehidupan keluarga, membantu individu-individu mengatasi masalah-masalah yang berasal dari luar atau pun dari dalam diri, meningkatkan perkembangan, dan memudahkan akses melalui pemberian informasi, bimbingan, advokasi dan beberapa jenis bantuan konkret.

Dari definisi Kahn diatas dapat peneliti tarik kesimpulan, pelayanan sosial personal adalah pelayanan yang bersifat meningkatkan perkembangan individu dan keluarga melalui beberapa jenis bantuan yang konkret atau bersifat nyata. Kalau dikaitkan dengan konsep keadilan, pelayanan sosial personal berkaitan dengan keadilan yang memerlakukan orang yang berbeda secara berbeda pula, bukan keadilan yang memerlakukan orang yang berbeda secara sama. Sumber-sumber disesuaikan dengan perbedaan-perbedaan individu atau kelompok dan bukan dengan persamaan-persamaan diantara orang-orang. Pelayanan sosial personal mengusahakan keseimbangan antara memperhatikan kebutuhan yang sama dari suatu kelompok tertentu dengan menekankan kebutuhan-kebutuhan dan hak-hak individual seorang anggota tertentu dari kelompok tersebut. Pelayanan sosial diartikan dalam dua macam, yaitu:

- a. Pelayanan sosial dalam arti luas adalah pelayanan sosial yang mencakup fungsi pengembangan termasuk pelayanan sosial dalam

bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, tenaga kerja dan sebagainya.

- b. Pelayanan sosial dalam arti sempit atau disebut juga pelayanan kesejahteraan sosial mencakup program pertolongan dan perlindungan kepada golongan yang tidak beruntung seperti pelayanan sosial bagi anak terlantar, keluarga miskin, cacat, tuna sosial dan sebagainya (Muhidin, 1992: 41).

Pelaksanaan pelayanan sosial ini mencangkup adanya suatu perbuatan yang aktif antara pemberi dan penerima. Untuk mencapai sasaran sebaik mungkin perlu mempergunakan sumber-sumber yang tersedia, sehingga benar-benar efisien dan tepat. Pelayanan sosial tidak hanya mengganti atau berusaha memperbaiki keluarga dan bentuk-bentuk organisasi sosial, tetapi juga merupakan penemuan sosial yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia modern dalam berbagai hubungan dan peran-perannya.

Richard M, titmuss mengemukakan fungsi pelayanan sosial ditinjau dari perspektif masyarakat sebagai berikut:

- 1) Pelayanan-pelayanan atau keuntungan-keuntungan yang diciptakan untuk lebih meningkat kesejahteraan individu kelompok dan masyarakat untuk masa sekarang dan untuk masa yang akan datang.
- 2) Pelayanan-pelayanan atau keuntungan-keuntungan yang diciptakan sebagai suatu investasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tujuan sosial (suatu program tenaga kerja)
- 3) Pelayanan-pelayanan atau keuntungan-keuntungan yang diciptakan untuk melindungi masyarakat.
- 4) Pelayanan-pelayanan atau keuntungan-keuntungan yang diciptakan sebagai program kompensasi bagi orang-orang yang tidak mendapat pelayanan sosial (misalnya kompensasi kecelakaan industri dan sebagainya)

Pelayanan sosial diadakan untuk melindungi, mengadakan perubahan, atau menyempurnakan kegiatan-kegiatan pendidikan, asuhan anak, penanaman nilai,

dan pengembangan hubungan sosial yang dimasa lampau menjadi fungsi keluarga, lingkungan tetangga, dan kerabat. Perkembangan pelayanan sosial yang sangat cepat, motivasi yang beraneka ragam, diantara para penyusunnya dan besarnya beban kasus maupun tenaga yang terlibat di dalamnya menyebabkan perlunya menggunakan pelayanan. Pelayanan sosial cenderung menjadi pelayanan yang ditujukan kepada golongan masyarakat yang membutuhkan pertolongan dan perlindungan khusus. Seperti pemberian pelayanan kepada masyarakat miskin melalui suatu program. Program tersebut dapat berupa program BPNT.

Program BPNT merupakan pelayanan sosial yang dapat memberikan layanan terhadap masyarakat yang menerima untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam pemberian pelayanan melalui program BPNT ditujukan untuk meningkatkan keterampilan atau dengan mengurangi kesulitan dalam masyarakat dapat ditingkatkan kondisi kehidupannya. Pelayanan sosial digunakan agar individu mampu memperbaiki kualitas hidup dan mampu mengembalikan fungsi sosialnya kembali di masyarakat.

2.5 Konsep Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Sebelum adanya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pemerintah dalam menangani kemiskinan yaitu dengan adanya program Raskin. Menurut buku panduan Raskin (2014), Raskin dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional.

Menurut Winarni (dalam Masta, 2016) bantuan beras miskin atau yang biasa disebut Raskin merupakan suatu bantuan yang memberikan perlindungan kepada keluarga miskin melalui beras bersubsidi guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran keluarga pada jumlah yang telah ditentukan dan tingkat harga tertentu.

Kemudian dalam program raskin pada tahun 2015 di ganti menjadi rastra. Alasan mengganti naman raskin menjadi rastra adalah untuk mengubah pemikiran yang sebelumnya beras ini untuk membantu masyarakat miskin, agar kini beras yang disubsidi pemerintah untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Kemudian Kementerian sosial telah mengubah subsidi beras miskin (raskin) menjadi beras sejahtera (rastra), dan lebih disempurnakan menjadi bantuan sosial rastra, yang bertujuan lebih memudahkan masyarakat. Sedangkan untuk semua penerima bantuan sosial rastra, tidak dipungut biaya. Kini berubah nama dari raskin menjadi rastra, dari berbayar ke tidak berbayar.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program lanjutan dari Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra), dimana pemerintah hanya memberikan beras 10 kilogram per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah diatur dalam peraturan menteri sosial RI NO. 11 Tahun 2018 tentang Bantuan Pangan Non Tunai.

Tahun 2017 pemerintah menjalankan program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Rastra diganti dengan program Voucher Pangan. Voucher pangan dapat digunakan untuk menembus atau membeli berbagai bahan pokok seperti beras, telur, minyak goreng dan lainnya di pasar, di warung, di toko atau agen kusus yang diberi nama *e-warong*. Program ini sebagai upaya meningkatkan akses dalam memenuhi hak dasar masyarakat miskin terhadap kebutuhan pangan. Dengan adanya reformasi ini, rakyat yang belum sejahtera dan belum mampu akan memiliki lebih banyak pilihan yang bisa membeli sembako di pasar ataupun di toko dengan kualitas yang lebih serta juga bisa memperoleh nutrisi yang lebih seimbang.

Dalam menjalankan program BPNT terdapat *standart operasional prosedur* (SOP). SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah rendahnya. SOP dalam program BPNT adalah:

2.5.1 Persiapan

Persiapan merupakan tahap awal kegiatan setelah kementerian sosial menetapkan bank penyalur BPNT.

2.3.1.1 Koordinasi Pelaksanaan

a. Koordinasi di tingkat pemerintahan pusat

Koordinasi di tingkat pemerintah pusat dilakukan antara Kementerian Sosial sebagai Pengguna Anggaran (PA) Program BPNT dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan dilaporkan atau dikonsultasikan kepada Tim Pengendali. Koordinasi dengan kementerian dan lembaga dilakukan untuk memperoleh masukan dan arahan terkait dengan pelaksanaan program. Koordinasi juga dilakukan untuk memastikan dasar hukum, mekanisme pelaksanaan di lapangan, serta berbagai prosedur administrasi lainnya.

b. Koordinasi di tingkat pemerintah provinsi

Pemerintah provinsi melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi melakukan koordinasi secara berjenjang dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota terkait seluruh tahap pengelolaan dan pelaksanaan Program BPNT di Kabupaten/Kota, mulai dari dukungan pendanaan melalui APBD, koordinasi pagu dan data KPM, sosialisasi, penanganan pengaduan, pemantauan dan dukungan lain yang diperlukan terkait BPNT.

c. Koordinasi di tingkat pemerintah kabupaten/kota

Pemerintah kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan Bank penyalur. Kemudian pemerintah Kabupaten/Kota memberikan dukungan sarana dan prasarana, edukasi dan sosialisasi, kemudahan perizinan atau keringan biaya perizinan serta fasilitas perpajakan kepada *E-warong*.

Pelaksanaan Program BPNT di tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasi oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan di tingkat Kecamatan dikoordinasi oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan. Pelaksanaan ditingkat desa/kelurahan didukung oleh perangkat desa setempat serta pendamping program BPNT.

2.5.2 Penyerahan Data Penerima Manfaat

- a. Jumlah pagu Peyaluran BPNT tingkat provinsi dan kabupaten/kota merujuk pada keputusan menteri sosial ayang akan disampaikan suluruh Gubernur dan Bupati/Walikota melalui surat menteri sosial.
- b. Data nama dan alamat keluarga penerima manfaat untuk penyaluran BPNT yang bersumber dari DT-PPFM
- c. Data nama dan alamat keluarga penerima manfaat untuk penyaluran BPNT diserahkan kepada Bank Penyalur
- d. Data nama dan alamat keluarga penerima manfaat untuk penyaluran BPNT dari kementerian sosial diserahkan kepada Bank Penyalur ke Bupati/walikota
- e. Kepesertaan KPM pada program BPNT dapat berganti karena meningga, pindah keluar kota, KPM yang menolak dan tercatat ganda
- f. Data nama dan alamat keluarga penerima manfaat untuk penyaluran BPNT sudah diberikan penanda untuk KPM penerima PKH.

2.5.3 Persiapan *E-Warong*

Hal-hal yang perlu dipersiapkan Bank Penyalur dalam menetapkan agen bank, pedagang atau pihak lain untuk menjadi *e-warong* dalam penyalur BPNT, sedikitnya mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a. Memastikan jumlah dan sebaran *e-warong* di setiap lokasi penyaluran. Bank Penyalur harus merekrut *e-warong* dengan rasio *e-warong* dengan KPM 1:250 dan minimum 2 (dua) *e-warong* dalam satu desa/kelurahan tidak terbatas pada agen Bank Penyalur tersebut. Pelaporan rasio *e-warong* dengan KPM dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penyaluran tahap pertama.
- b. Memberikan layanan perbankan kepada *e-warong*, termasuk di antaranya: pembukaan rekening tabungan, pendaftaran menjadi agen Laku Pandai atau LKD, dan layanan usaha lainnya.
- c. Melakukan upaya edukasi dan sosialisasi, pemasaran/*branding*, perbaikan fasilitas *e-warong* dan lainnya untuk melayani KPM.

- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pembelian bahan pangan dengan menggunakan Kartu Kombo, termasuk:
- 1) Memastikan ketersediaan jumlah mesin pembaca kartu kombo pada *e-warong* untuk memproses pembelian bahan pangan oleh KPM
 - 2) Melakukan *edukasi* penggunaan mesin pembaca kartu kombo *e-warong* dan memastikan *e-warong* siap melayani
 - 3) Menyediakan dukungan teknis dan pemantauan berkala terhadap kelancaran operasional alat transaksi
 - 4) Menyediakan petugas bank (*Asisten Branchless Banking-ABB, Contact Person*) yang dapat dihubungi oleh *e-warong* guna kelancaran dan kemudahan pelaksanaan pembelian bahan pangan.
 - 5) Bank Penyalur setempat menyampaikan daftar *e-warong* kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan setempat dan Kontak Informasi.

2.5.4 Sasaran Edukasi dan Sosialisasi

Kegiatan edukasi dan sosialisasi merupakan salah satu kegiatan inti dalam mekanisme penyaluran BPNT. Pelaksanaan dan Sasaran Edukasi dan Sosialisasi.

- a. Tujuan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi Program BPNT adalah:
- a) Memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan baik pusat dan daerah mengenai kebijakan dan Program BPNT.
 - b) Memberikan pemahaman kepada KPM tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan Program BPNT.
 - c) Memberikan informasi tentang mekanisme pengaduan Program BPNT.
- b. Sasaran dari pelaksanaan edukasi dan sosialisasi program BPNT adalah:
- a) Kementerian atau Lembaga terkait.
 - b) Pemerintah daerah, termasuk Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- c) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat Kecamatan.
 - d) Perangkat desa/kelurahan dan jajarannya
 - e) Pendamping Program BPNT, antara lain: Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Koordinator dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan pendamping sosial lainnya serta perangkat kelurahan atau desa.
 - f) Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
 - g) Pemilik atau Pengelola *e-warong*.
 - h) Bank Penyalur maupun Bank Acquirer (Bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari Alat Pembayaran Menggunakan Kartu/uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain Acquirer yang bersangkutan serta bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang) baik ditingkat pusat maupun cabang.
- c. Pelaksana Edukasi dan Sosialisasi. Pelaksana edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan Program BPNT, terdiri dari:
- a) Pemerintah: Sosialisasi dilakukan oleh pemerintah secara berjenjang sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.
 - b) Bank Penyalur.
 - c) Pemilik/Pengelola *e-warong*.

2.5.5 Registrasi dan/atau Pembukaan Rekening Penerima Kartu Kombo

Proses Registrasi dan/atau pembukaan rekening penerima Kartu Kombo terdiri dari :

a. Proses 1

Bank penyalur melakukan registrasi atau pembukaan rekening secara kolektif atas data yang diberikan dan ditetapkan oleh kementerian sosial berdasarkan DT-PPFM.

b. Proses 2

Bank penyalur melakukan distribusi Kit Kartu Kombo kepada KPM. Dalam kegiatan ini, pendamping juga melakukan pendampingan proses distribusi Kit Kartu Kombo. Proses ini dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada KPM.

c. Proses 3

Bank penyalur menyampaikan laporan dengan format buku antar bank dan *dashboard* Program BPNT kepada Kementerian Sosial dan Tim Pengendali.

2.5.6 Penyaluran

Proses penyaluran bantuan, terdiri dari:

- a. Bank Penyalur membukakan Akun Elektronik Bantuan Pangan untuk masing-masing KPM berdasarkan Daftar KPM Perubahan yang diterima dari Kementerian Sosial.
- b. Bank Penyalur melakukan pemindahan buku dana Bantuan Sosial dari rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur ke rekening KPM.
- c. Rekening KPM digunakan untuk menampung seluruh program Bantuan Sosial yang diterima oleh KPM dan dapat dibedakan penggunaannya untuk masing-masing program Bantuan Sosial.
- d. Kementerian Sosial memberikan perintah pembayaran kepada Bendahara Umum Negara/Daerah sebagai dasar untuk pencairan dana BPNT.
- e. Bendahara Umum Negara/Daerah melakukan pencairan dana dari rekening kas umum negara/daerah kepada rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur sesuai perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial.
- f. Bank Penyalur menyampaikan laporan hasil penyaluran dana bantuan sosial kepada Kementerian Sosial dengan tembusan kepada Tim Pengendali.

- g. Bank Penyalur memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai dana Bantuan Pangan yang sudah ditransfer ke rekening BPNT KPM.
- h. Transfer dana BPNT ke rekening BPNT KPM dijadwalkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima).
- i. Bank memastikan sistem uang elektronik tidak berubah setiap periode penyaluran sehingga kode transaksi di mesin EDC tidak berubah.

2.5.7 Pemanfaatan

Proses pemanfaatan dana bantuan dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Datang : KPM membawa Kartu Kombo datang ke *e-warong* yang bertanda khusus Non Tunai dan sudah bekerja sama dengan Bank Penyalur
- b. Cek : Lakukan cek kuota bantuan pangan melalui mesin EDC.
- c. Pilih : Pilih jenis bahan pangan beras dan/atau telur dengan jumlah sesuai kebutuhan, lakukan pembelian dengan memasukkan nominal harga dan PIN pada EDC bank.
- d. Terima : Terima bahan pangan yang telah dibeli serta bukti transaksi untuk disimpan.

2.6 Konsep Implementasi Program

Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut, “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan” (Usman, 2002:70).

Grindle (1980:7) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Grindle (1980:7) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran kebijakan telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap, serta telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Grindle (1980:6-10) memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran atau hasil keputusan baik berupa materi program yang telah dicapai melalui interaksi-interaksi antar aktor tersebut akhirnya ditentukan oleh para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Salah satu tolak ukur keberhasilan suatu program adalah terletak pada proses implementasinya dan pada tahap implementasi ini merupakan tahap yang paling penting dalam keseluruhan suatu program dalam menilai suatu program dapat dikatakan berhasil atau tidak.

Implementasi program BPNT dapat dikatakan berhasil apabila dalam pelaksanaannya program BPNT tersebut sudah sesuai dengan SOP yang terdapat pada pedoman umum BPNT. Dalam hal ini harus dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yang sudah di atur dalam suatu SOP . Hal tersebut harus adanya proses yang jelas dalam persiapan pelaksanaan, pembentukan *e-warong*, edukasi sosialisasi dan penyaluran BPNT. Selain itu harus tepat sasaran, kemanfaatan bagi penerima. Kemudian jika penyaluran tidak sesuai dengan SOP dan pedoman

umum BPNT, dimana penerima BPNT tidak sesuai dengan karakteristik yang telah di tetapkan, pendistribusian tidak menggunakan *e-warong* yang telah tercantum dalam undang-undang maka program tersebut dapat dikatakan tidak berhasil. Hal tersebut perlu adanya evaluasi program BPNT, agar program tersebut sesuai dengan pedoman Umum BPNT. Kemudian program yang berhasil dapat kita lihat apabila:

- a. Komunikasi prasyarat pertama bagi implementasi yang efektif adalah mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Dengan demikian, suatu program dapat berhasil bila program tersebut terlebih dahulu diinformasikan dengan jelas dan konsisten serta mudah dipahami.
- b. Sumber daya merupakan faktor yang penting sebab jika para pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijaksanaan maka implementasi mungkin tidak efektif, sumber daya itu meliputi staf yang memadai dengan keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas. Begitu juga wewenang dan fasilitas yang diperlukan, jika pelaksana kekurangan wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan akan menyebabkan terkendalanya pencapaian tujuan.
- c. Sikap pelaksana atau kecenderungan pelaksana. Sikap dari pelaksana merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang penting bagi implementasi kebijaksanaan yang efektif. Jika pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijaksanaan tertentu, kemungkinan besar mereka melaksanakannya sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan, proses implementasi suatu kebijaksanaan semakin sulit. Dengan demikian kecenderungan-kecenderungan pelaksana bisa menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata.
- d. Struktur organisasi yang melaksanakan mempunyai pengaruh penting kepada implementasi. Para pelaksana kebijaksanaan mungkin mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup

keinginan serta sumber daya untuk melakukan, tetapi mereka mungkin dihambat oleh struktur birokrasi dengan ciri adanya kecenderungan unit kerja yang berkembang serta keinginan untuk keseragaman prosedur merupakan tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber daya dari pelaksana serta keinginan keseragaman dalam bekerjanya suatu organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan kecenderungan unit kerja yang berkembang sebagai tanggapan terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi.

Hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah itu sejak pembentukan kebijakan harus memperhatikan dan memperhitungkan faktor-faktor yang disebutkan di atas. Dalam penelitian ini berusaha menggabungkan dengan teori-teori implementasi.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program BPNT dapat terlihat dari dukungan masyarakat dan kerja keras dari pemerintah atau pendamping program BPNT dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat di Desa Kajarharjo harus paham tentang program BPNT karena program tersebut yang menggunakan kartu yang dapat ditukarkan di *e-warong*. Dalam penyaluran program ini harus koordinasi yang baik antar instansi pelaksana program BPNT, hal ini sesuai dengan aspek teoritik mengenai implementasi program bahwa aspek kordinasi dan kerjasama merupakan aspek penting keberhasilan.

Jadi yang dimaksud dengan implementasi program BPNT yang efektif bagi penerima adalah tercapainya kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dengan program program BPNT dengan menggunakan kartu yang menyerupai ATM dan dapat di tukarkan di *e-warong* sesuai dengan kebutuhan seperti beras, minyak, telur gula. Hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga miskin atau rumah tangga miskin. Melalui pelaksanaan program BPNT ini dapat memberikan manfaat nyata dalam peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial rumah tangga.

2.7 Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial menurut Huraerah (2003 : 153), yaitu : “Kesejahteraan sosial adalah suatu kegiatan atau sekumpulan kegiatan yang ditujukan untuk membantu orang-orang yang bermasalah”.

Soehartono (2009:1) menyatakan bahwa Pekerjaan Sosial yaitu aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut. Fokus pekerjaan sosial adalah membantu individu, kelompok dan masyarakat untuk meningkatkan keberfungsian sosial.

Menurut Edi Suharto (2006:3) kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Menurut International Federation of Social Worker (IFSW), pekerjaan sosial adalah sebuah profesi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, memberdayakan, dan membebaskan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya, dengan bertumpu pada teori-teori perilaku manusia dan sistem-sistem sosial dan intervensi yang dilakukan pada titik dimana orang berinteraksi dengan lingkungannya.

Menurut studi kurikulum yang disponsori oleh *the council on Social Work Education* yang dikutip oleh Adi Fahrudin (2012:59) dalam buku Pengantar Kesejahteraan Sosial, dinyatakan bahwa pekerjaan sosial adalah :

“Social work seeks to enhance to social functioning of individuals, singly and in groups, by activities focused upon their social relationship which constitute the interaction between man and his environment. These activities can be grouped into there functions, restoration of impaired capacity, provision of individual and social resources, and prevention of social dysfunction.”

Artinya, pekerjaan sosial berusaha untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu, secara sendiri-sendiri atau dalam kelompok, dengan kegiatan-kegiatan yang dipusatkan pada hubungan-hubungan sosial mereka yang

merupakan interaksi antara orang dan lingkungannya. Kegiatan-kegiatan ini dapat dikelompokkan menjadi tiga fungsi, pemulihan kemampuan yang terganggu, penyediaan sumber-sumber individu dan sosial, dan pencegahan disfungsi sosial.

Kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosial. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 1 ayat 1.

Menurut Zastrow (1999) dalam Edi Suharto (2007:1) Pekerjaan sosial adalah aktivitas professional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai suatu aktivitas professional, pekerjaan sosial didasari oleh kerangka pengetahuan (*body of knowledge*), kerangka keahlian (*body of skill*) dan kerangka nilai (*body of value*) yang secara integratif membentuk profi dan pendekatan pekerjaan sosial.

Keberfungsian sosial merupakan ekspresi interaksi antara orang dengan lingkungan sosialnya. Keberfungsian sosial merupakan hasil atau produk dari aktivitas orang dalam berelasi dengan sekelilingnya. Jadi keberfungsian sosial berkaitan dengan hasil interaksi orang dengan lingkungan sosial (De Gusman, 1982). Dijelaskan oleh Zastrow (1982) bahwa manusia senantiasa hidup dalam berbagai sistem, seperti sistem keluarga, pelayanan sosial, politik, pekerjaan, keagamaan, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Interaksi orang dengan sistem-sistem tersebut mempengaruhi tingkat keberfungsian sosial mereka. Dalam hal ini interaksi yang kondusif akan menyebabkan orang mampu memenuhi kebutuhan, melaksanakan tugas, dan mencapai tujuan hidup. Namun sebaliknya, jika interaksinya kurang baik akan menyebabkan orang tersebut mengalami masalah.

Keberfungsian sosial sebagai wujud kemampuan dalam memenuhi kebutuhan. Semua orang mempunyai kebutuhan dalam kehidupannya. Ada orang yang dapat memenuhi kebutuhannya itu dengan baik, tetapi sebagian yang lain mempunyai permasalahan dalam memenuhinya. Karena faktor kemampuan atau

situasi, masyarakat rentan tidak cukup memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar. Masyarakat dapat dikatakan berfungsi sosial adalah ketika masyarakat penerima program BPNT sudah dapat melakukan peranan sosial di dalam masyarakat, dapat memenuhi kebutuhan tanpa adanya program BPNT, dan dapat mensejahterakan keluarganya.

2.8 Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu adalah memberikan acuan dan landasan kerangka berfikir untuk mengkaji masalah yang menjadi saran dari sebuah penelitian. Kajian terhadap penelitian terdahulu diambil dari berbagai penelitian yang berhubungan dengan Implementasi Program Bantuan Non Tunai (BPNT).

Kajian terhadap penelitian terdahulu diambil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan program pemerintah yaitu pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui program yang direncanakan oleh pemerintah. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan program pemerintah adalah penelitian dari:

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Dahulu

Penulis	Tahun	Judul penelitian	Hasil penelitian	Analisa
Riska Yulinda	2016	Evaluasi pelaksanaan program beras untuk keluarga miskin (Raskin) Tahun 2014, di Desa Sruni Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Raskin belum sepenuhnya berjalan efektif sesuai dengan perencanaan program. Dalam pelaksanaan program raskin ini terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, diantaranya pada proses penetapan sasaran, jumlah masyarakat miskin yang di tetapkan pemerintah, masyarakat miskin tidak mampu	Penelitian yang dilakukan oleh Riska Yulinda dapat menjadi masukan penelitian yang dilakukan peneliti, karena program yang diteliti adalah program yang digunakan dalam pengentasan kemiskinan. Hanya saja bentuk program yang telah di teliti oleh Riska

			membayar tebusan dan hambatan yang berasal dari masyarakat Desa Sruni itu sendiri.	Yulinda sudah diganti dengan program yang baru yang akan di teliti oleh peneliti.
Dewi Nasirohut Taufiqoh	2014	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bagi rumah tangga /keluarga sangat miskin (RTSM/KSM) (Studi Deskriptif di Dusun Sentong Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum proses implementasi program keluarga harapan di Dusun Sentong masih kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari setiap tahapan proses implementasinya yang kurang berjalan dengan lancar, dan masih banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi, untuk tujuan dari PKH masih jauh dari harapan. Akan tetapi untuk sasaran penerima PKH ini sudah sesuai dengan kriteria data penerima PKH.	Penelitian dari Dewi Nasirohut Taufiqoh dapat menjadi masukan dengan adanya kesamaan terkait implementasi. Program, namun pada penelitian terdapat perbedaan program yang diteliti.
Aswardi, Faried Ali dan Nurlinah (dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan)	2012	Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone	Dari hasil analisis data dan fakta hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi program Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin) di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone belum berjalan sesuai dengan yang di harapkan, Hal ini ditandai dengan kurangnya antusiasme warga miskin sasaran Raskin yang menyambut baik program ini, dimana hal tersebut tentu saja	Penelitian tersebut dapat menjadi masukan dalam penelitian ini, karena terdapat fokus penelitian yang sama yaitu implementasi program pengentasan kemiskinan. Hanya saja program yang di teliti sudah berganti nama menjadi program BPNT.

tidak lepas dari peran serta Pemerintah Daerah selaku pelaksana Teknis kegiatan penyaluran beras Raskin tersebut baik itu Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan Kelurahan hingga sampainya ketangan masyarakat miskin, termaksud juga kurangnya peran baik dari Perum BULOG itu sendiri yang menyediakan stok beras serta mendistribusikan kepada Kelurahan. Adapun permasalahan yang timbul dalam Implementasi Program Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin) di Kecamatan Tanete Riattang adalah sebagai berikut: Pertama, Penetapan Daftar nama-nama RTMS Raskin yang tidak sesuai, Kedua, Kurangnya koordinasi antara pihak penyelenggara pelaksanaan distribusi Beras Raskin, Ketiga, Kurangnya pengawasan dari Pejabat yang berwenang terhadap proses penyaluran Raskin, dan yang terakhir, Kurangnya sosialisasi dalam rangka program penyaluran Raskin.

2.9 Kerangka Berfikir

Kebijakan sosial merupakan suatu peraturan yang dibentuk oleh pemerintah yaitu dengan mengeluarkan program-program sebagai suatu bentuk penanganan permasalahan di Indonesia. Kebijakan sosial menurut Suharto (2014:82) adalah seperangkat tindakan (*course of action*), kerangka kerja (*framework*), petunjuk (*guidline*), rencana (*plan*), peta (*map*), atau strategi yang direncanakan untuk menterjemahkan visi politis pemerintah atau lembaga pemerintah kedalam program dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang kesejahteraan sosial.

Kebijakan termasuk kedalam peraturan dimana peraturan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dari sebuah kebijakan tersebut pemerintah berharap nantinya akan memberikan sebuah perlindungan, serta memberikan peningkatan bagi objek dari kebijakan tersebut atau yang disebut dengan masyarakat. hal tersebut akan membentuk sebuah kerangka dari adanya suatu kebijakan yang berbentuk program. Program-program tersebut merupakan program yang telah direncanakan oleh pemerintah dan telah disahkan sesuai dengan peraturan perundang-undang. Program yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut dapat berupa program yang digunakan sebagai pembangunan.

Tujuan dari pembangunan tersebut merupakan usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dengan memberikan prioritas utama pada masyarakat miskin pada pelaksanaan program pembangunan. Kemudian tujuan pembangunan sosial sendiri adalah tercapainya kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan kualitas hidup dan terpenuhinya kebutuhan dasar. Karena dalam suatu pembangunan, pemerintah harus melihat jenjang pendidikan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, putus sekolah, hambatan geografis, keterlantaran atau disabilitas.

Desa Kajarharjo merupakan salah satu desa yang menjalankan kebijakan program sebagai pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat. Desa Kajarharjo terletak diwilayah Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi merupakan Desa yang memiliki kondisi geografis jauh dari kota, termasuk dalam lereng gunung gumitir. Kemudian kondisi jalan yang tidak merata dan listrik yang

terbatas membuat masyarakat sulit dalam akses ke kota. Maka dari itu untuk ketersediaan lapangan pekerjaan lebih banyak diluar desa. Karena untuk Di Desa Kajarharjo tersebut kebanyakan masyarakatnya berkebun. Hal tersebut sesuai dengan kondisi geografis Desa Kajarharjo adalah perkebunan. Kemudian untuk jenjang pendidikan di Desa Kajarharjo sebagian besar tingkat SMA. Kemudian untuk sekolah lebih tinggi harus keluar dari Desa Kajarharjo. Pendidikan di Desa kajarharjo tidak begitu diperhatikan untuk daerah pegunungan, karena akses ke kota yang sulit untuk ditempuh maka banyak usia sekolah yang sudah tidal lagi mengenyam pendidikan. Kemudian untuk disabilitas desa kajarharjo dapat dikatakan tidak, karena untuk kesehatan atau tenaga medis di desa sudah sangat membantu masyarakat dan sudah dapat menjangkau di daerah pegunungan.

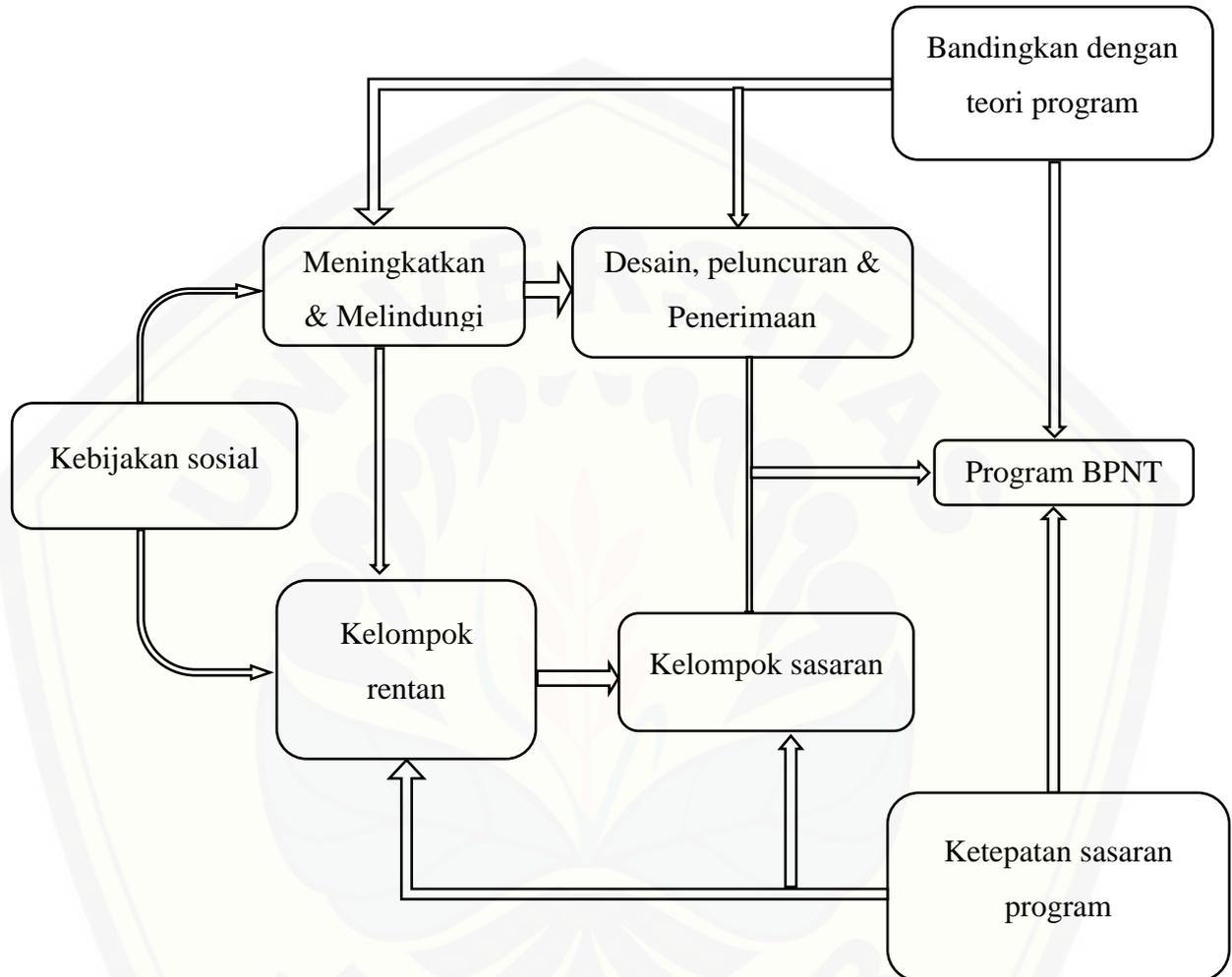
Dengan hambatan-hambatan yang terdapat di Desa Kajarharjo, pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjalankan kebijakan melalui program. Kebijakan program BPNT yaitu berusaha meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Hal tersebut dikarenakan daya beli masyarakat yang rendah. Program tersebut digunakan untuk melindungi masyarakat miskin dari kurangnya kebutuhan pokok atau kebutuhan sehari-hari. Program ini di desain oleh pemerintah dengan cara online. Kemudian desain dari kebijakan program BPNT tersebut bersifat sporadis karena tidak berkelanjutan. Akan tetapi disisi lain kebijakan program BPNT juga dapat berkelanjutan apabila masyarakat atau KPM dapat memanfaatkan dengan baik.

Program BPNT disalurkan kepada KPM melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut berupa persiapan, edukasi dan sosialisasi, registrasi dan pembukaan kartu kombo, penyaluran program dan pemanfaatan program BPNT untuk KPM. Program BPNT diberikan kepada masyarakat miskin secara gratis melalui kartu yang didalamnya terdapat Rp.110.000 yang dapat ditukarkan pada *e-warong*. Tujuan diberikan program BPNT tersebut adalah untuk menjaga ketahanan pangan dan memperbaiki nutrisi masyarakat melalui kartu yang dapat ditukarkan dengan beras dan telur. Akan tetapi program BPNT dapat menyebabkan ketergantungan masyarakat atau KPM.

Pemerintah dalam hal ini harus berhati-hati terhadap program BPNT. Kebijakan pasti menyebabkan kerentanan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebenarnya sudah pasti memiliki tujuan melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kerentanan disini masyarakat atau KPM akan bergantung, pura-pura miskin dan lain sebagainya. Beberapa permasalahan tersebut merupakan salah satu kerugian dari kebijakan program BPNT.

Kerugian dari kebijakan tersebut pada kelompok sasaran atau *target group*. Kerugian dan kerentanan yang terjadi serta perlindungan (*protect*) dan peningkatan (*increase*) dari sebuah program BPNT dapat sesuai dengan tujuan adanya kebijakan dari pemerintah yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Target garup atau kelompok sasaran ini merupakan kelompok sasaran yang memiliki kondisi geografis yang menghambat masyarakat masyarakat dalam akses pada lapangan pekerjaan maupun pendidikan. Untuk lapangan pekerjaan yang tersedia pada umumnya adala berkebun. Karena di Desa kajarharjo mayoritas masyarakat berkebun dan untuk akses keluar dari desa tersebut harus ditempuh dengan jalan yang cukup susah dan harus melewati perkebunan. Kemudian untuk pendidikan itu sendiri masyarakat dalam menempuh perjalanan kesekolah dapat dikatakan jauh. Sehingga dengan adanya proses tersebut maka implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Bagan 2.2. Alur Pikir Konsep Penelitian



BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan sistematis dan teliti dengan tujuan mendapatkan pengetahuan yang telah ada, dimana sikap orang yang bertindak itu harus kritis dan prosedur yang digunakan harus lengkap. Di dalam sebuah penelitian pasti menggunakan pendekatan penelitian. Dalam pendekatan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif menurut Moleong (2014:6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam penelitian memiliki beberapa karakter diantaranya adalah

- a. Lokasi penelitian alamiah, peneliti menggali data langsung kelapangan dengan wawancara kepada semua subyek penelitian, observasi terhadap beragam situasi dan aktivitas yang dilakukan subyek, dan menyalin dokumen-dokumen tertulis atau gambar yang ada di tempat penelitian
- b. Oleh karena itu dalam hal ini, peneliti merupakan instrumen kunci
- c. Obyek yang peneliti gali sebenarnya merupakan makna esensi dari pengalaman-pengalaman subyek yang kemudian peneliti analisis secara induktif
- d. Bersifat interpretatif, peneliti melakukan interpretasi atas apa yang terlihat, terdengar dan terpahami dalam *setting* alamiah (Creswell, J.W., 1999:147)

Sehingga dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif akan mempermudah penelitian yang akan dilakukan terkait dengan fenomena yang ada di lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan

jalan melibatkan berbagai metode yang ada, Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2012:5).

Tujuan dari penggunaan metode penelitian kualitatif ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang implementasi program bantuan pangan non tunai bagi masyarakat yang menerima manfaat atau penerima bantuan tersebut. Implementasi program tersebut dapat kita lihat di desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi yang sudah menjalankan program tersebut.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam meneliti adalah menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu suatu metode di dalam meneliti tentang status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Menurut (Sugiono,2015) metode deskriptif merupakan penelitian yang dikaitkan dengan mengumpulkan data untuk memberikan konsep atau gejala di lapangan dan dikumpulkan sejauh yang dianggap cukup dalam menggambarkan fenomena yang diteliti dan perkembangannya dimasyarakat.

Pada penelitian deskriptif kualitatif menggambarkan fenomena yang ada, kemudian diuraikan dengan menggunakan kata kata menurut informan. Data data tersebut didapat dari hasil dokumentasi, responden, observasi yang kemudian di analisis.

Dengan demikian penelitian yang menggunakan metode deskriptif ini merupakan penelitian yang memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagaimana adanya, sesuai dengan kondisi dan situasi yang sebenarnya di lapangan tanpa adanya pengolahan atau tambahan dari peneliti (Ibrahim, 2015:59). Sehingga nantinya penelitian ini dapat menggambarkan kondisi implementasi suatu program bantuan pangan non tunai, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting di dalam penelitian. Lokasi penelitian ini memberikan kontribusi langsung dalam proses penelitian. Moleong (2004:86) menjelaskan bahwa cara terbaik dalam menentukan lokasi adalah dengan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu juga di jadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.

Soebagyo (1997:35) mengemukakan lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi ini sangat menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid. Intinya lokasi penelitian yang baik yaitu lokasi atau obyek penelitian yang sesuai dengan obyek permasalahannya. Peneliti dalam hal ini penentuan lokasi menggunakan *purposive area*. *Purposive area* adalah lokasi yang memang sengaja dipilih oleh peneliti dari awal dengan menggunakan pertimbangan yang mempunyai kriteria yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang digunakan (Bugin, 2008:107)

Lokasi yang digunakan oleh peneliti adalah di desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi termasuk Kabupaten yang pertama kali yang menjalankan program BPNT dibandingkan Kabupaten Jember dan Pulau Madura. Selain itu untuk Desa Kajarharjo merupakan Desa yang berada di Kecamatan di perbatasan. Dimana dalam penelitian ini akan dilihat implementasinya bagi masyarakat penerima BPNT. Karena biasanya ketika suatu program tersebut diterapkan pada masyarakat yang kurang mampu akan sedikit berbeda dengan ketika dihadapkan pada masyarakat yang mampu. Alasan lain di pilihnya lokasi ini adalah jumlah masyarakat desa Kajarharjo yang menerima BPNT paling banyak di Kecamatan Kalibaru, kemudian jumlah masyarakat miskin di desa Kajarharjo juga cukup banyak, yaitu mencapai 26.433 jiwa dari 576.137 jiwa yang memiliki status sebagai masyarakat yang tergolong miskin. (<http://demografi.banyuwangikab.go.id/>). Dimana rata-rata masyarakatnya bekerja sebagai buruh perkebunan. Dengan perekonomian yang rendah masyarakat desa Kajarharjo juga memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga dengan

pendidikan yang rendah akan menyebabkan posisi di dalam pekerjaan juga akan menyesuaikan dengan pendidikan dan kemampuannya.

3.4. Teknik Penentuan Informan

Menurut Moleong (2004;132), informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang latar penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal.

Penentuan informan dalam penelitian menggunakan rancangan random sampling yang artinya teknik yang memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2006:60). Dengan melihat karakteristik yang ada maka kajian ini dalam menentukan informan menggunakan teknik *Purposive sampling* yakni dengan cara menentukan informan yang dilakukan dengan sengaja dengan pertimbangan tertentu. Bungin (2012:107) menyatakan mengenai pengertian *purposive* yaitu salah satu strategi penentuan informan yang paling umum dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu.

Informan *purposive* dibedakan menjadi 2 yaitu informan pokok dan informan tambahan. Berikut ini penggolongan jenis informan yang digunakan dalam meneliti kajian ini. Dalam penentuan informan peneliti menggunakan dua jenis informan dalam penelitian yaitu :

3.4.1 Informan Pokok

Informan pokok merupakan informan kunci dari sumber informasi yang memahami secara detail mengenai situasi sosial atau fenomena sosial yang sedang terjadi, yang digunakan sebagai sumber data utama (Suyanto dan Sutinah, 2005:172). Sedangkan informan kunci (*key informan*) dibutuhkan adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan. Dalam penelitian ini penentuan informan pokok tidak lepas dari kriteria yang di butuhkan, yaitu:

- a. Subyek yang memiliki wewenang dan mengetahui serta memahami program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- b. Subyek yang masih terlibat aktif dalam kegiatan atau pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam jangka waktu minimal 1 tahun
- c. Subyek memiliki cukup waktu untuk dimintai informasi
- d. Subyek yang dimintai informasi tidak dalam keadaan sakit atau tidak sedang mengalami gangguan kesehatan lainnya
- e. Subyek tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri
- f. Informan pokok apabila dilihat dari kriteria tersebut adalah informan yang memiliki dan mengetahui tentang informasi data maupun yang terlibat secara langsung dalam fenomena penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini informan pokok adalah sebagai berikut:
 1. Ketua atau koordinator pendamping program BPNT
 2. Ketua atau koordinator pendamping program merupakan orang mengerti dan lebih paham tentang program BPNT, proses penyaluran BPNT, kriteria penerima Program.
 3. Pendamping program BPNT dan PKH yang berperan langsung dalam program BPNT di Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi yang menjabat dan mengetahui program BPNT. Pendamping program memiliki pengaruh yang besar dan termasuk kedalam informan pokok, karena pendamping yang dapat mengarahkan KPM dalam pemanfaatan program BPNT.

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan 3 informan pokok yang memahami tentang program BPNT di Desa Kajarharjo. Berikut deskripsi singkat masing-masing informan pokok:

1. Nama :HR
Usia :-
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat :-
Pekerjaan : TKSK
2. Nama : MRA

Usia :24 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Kalibaru
Pekerjaan : Pendamping PKH

Kedua informan pokok diatas merupakan pendamping program BPNT dan PKH yang dianggap mampu dalam memberikan informasi tentang implementasi program BPNT.

3.4.2 Informan Tambahan

Informan tambahan dalam penelitian merupakan orang-orang yang dianggap tahu dan dapat memberikan informasi mengenai penelitian yang diteliti oleh peneliti. Dalam penentuan informan tambahan harus memiliki kriteria yang sesuai agar dapat memperoleh informasi yang jelas. Kemudian dalam penelitian informan tambahan digunakan untuk melengkapi informasi yang didapat. Adapun kriteria yang dipilih oleh peneliti untuk menentukan informan tambahan yaitu:

- a. Subyek dianggap mengerti tentang fenomena yang diteliti dan berhubungan dengan informan pokok
- b. Subyek merupakan keluarga penerima manfaat (KPM)
- c. Subyek memiliki cukup waktu untuk dimintai informasi
- d. Subyek yang dimintai informasi tidak dalam keadaan sakit atau tidak sedang mengalami gangguan kesehatan lainnya
- e. Subyek tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri

Berdasarkan kategori diatas dalam penelitian ini memerlukan informan tambahan, diantaranya adalah:

1. Masyarakat penerima program BPNT dijadikan informan tambahan, karena KPM merupakan sasaran program BPNT. Dari KPM peneliti dapat mendapatkan informasi tentang program BPNT
2. Kepala Desa dan perangkat Desa, Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi. Kepala Desa dapat dijadikan informan tambahan karena kepala desa yang mengetahui tentang

penduduk, baik penduduk yang menerima program BPNT maupun yang tidak menerima program.

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan 6 informan tambahan yang memahami tentang program BPNT di Desa Kajarharjo. Berikut deskripsi singkat masing-masing informan tambahan:

1. Nama : SR
Usia : 56 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat :-
Pekerjaan : Kepala Desa Kajarharjo
2. Nama : OA
Usia : 31 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat :-
Pekerjaan : Sekretaris Desa
3. Nama : KB
Usia : -
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Dusun jatipasir
Pekerjaan : Kepala Seksi Pemerintahan
4. Nama : SH
Usia :37 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat :Dusun Jatirono Desa Kajarharjo
Pekerjaan : Berkebun
5. Nama : YH
Usia : 48 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat :Dusun Jatirono Desa Kajarharjo
Pekerjaan : Penderes Karet

6. Nama : SJ
Usia : 52 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Dusun Jatirono Desa Kajarharjo
Pekerjaan : Berkebun

Informan yang ditentukan oleh peneliti merupakan KPM dari program BPNT dan kepala Desa beserta perangkat Desa yang mengetahui serta membantu dalam proses penyaluran program

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah suatu tahapan dalam sebuah penelitian dimana pada proses ini terdapat suatu langkah penting dalam metode penelitian. Menurut (Sugiono, 2015:62) mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data penelitian kualitatif adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

3.5.1 Observasi

Observasi dilakukan secara umum dalam memperoleh data dan informasi sebanyak mungkin. Di dalam melakukan observasi harus mempunyai kriteria antara lain yaitu:

- a. Pengamatan secara langsung untuk penelitian dan telah direncanakan
- b. Pengamatan harus sesuai dengan tujuan penelitian
- c. Penelitian tersebut harus di catat secara sistematis

Kemudian didalam penelitian Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai, peneliti harus memiliki tujuan yang kuat tentang fenomena tersebut. Tujuan dilakukan observasi tersebut yaitu untuk mengungkap fenomena dan mencatat fenomena dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan. Menurut Basrowi (2008:106) metode observasi di bagi menjadi 2 macam, yaitu; observasi partisipasi dan non-partisipasi.

- 1) Observasi partisipasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana peneliti terlibat langsung dalam keseharian informan.
- 2) Observasi nonpartisipasi merupakan metode pengumpulan data yang di gunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengidraan tetapi tidak terlibat langsung dalam keseharian informan.

Pada desain penelitian ini teknik observasi menggunakan observasi nonpartisipasi penghimpunan data melalui pengamatan dan pengindraan dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam keseharian informan. Dan juga menggunakan instrumen observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan di observasi, serta dalam pengamatan tidak menggunakan instrumen yang telah baku, melainkan hanya berupa rambu-rambu pengamatan.

Observasi dilakukan dengan sengaja di kantor Desa dan langsung datang ke KPM. Pada tahapan penyaluran program peneliti juga melakukan observasi. Akan tetapi pada saat observasi peneliti tidak mengganggu dalam proses penyaluran program BPNT kepada KPM. Kondisi yang ada pada aktivitas informan yaitu:

a. Informan pokok

Nama : HR

Umur : -

Pekerjaan : TKSK (pendamping program BPNT)

Lama bekerja : Sekitar 7 tahun

Tanggal wawancara : 15 Februari 2019

Informan tersebut merupakan informan pokok. beliau merupakan pendamping dari program BPNT yang biasa disebut dengan TKSK. Sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan dari peneliti. Pada proses wawancara dilakukan di ruang tunggu kantor Desa Kajarharjo.

b. Informan pokok

Nama : MRA

Usia : 24 Tahun

Pekerjaan : Pendamping PKH

Lama bekerja : 2 Tahun

Informan tersebut merupakan informan pokok. beliau merupakan pendamping dari PKH. Sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan dari peneliti. Pada proses wawancara dilakukan di rumah KPM yang sedang berlangsungnya pertemuan kelompok.

c. Informan tambahan

Nama : SR

Usia :

Pekerjaan : kepala Desa Kajarharjo

Informan tersebut merupakan informan tambahan. Beliau merupakan Kepala Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi. Sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu peneliti menjelaskan maksud dan tujuan. Pada proses wawancara berada diruang Kepala Desa.

d. Informan tambahan

Nama : OA

Usia : 31 Tahun

Pekerjaan : Sekretaris Desa

Informan tersebut merupakan informan tambahan. Beliau merupakan sekretaris desa. Penggalan informasi dilakukan dengan wawancara. Wawancara dilakukan di ruang kerja perangkat desa.

e. Informan Tambahan

Nama : KB

Usia :

Pekerjaan : Ketua Seksi Bidang Pemerintahan

Informan tersebut merupakan informan tambahan. Beliau merupakan Ketua Seksi Bidang Pemerintahan. Selain itu beliau merupakan perangkat desa yang membantu dalam proses persiapan dan penyaluran program. Penggalan informasi dilakukan dengan wawancara. Wawancara dilakukan di ruang kerja perangkat desa.

f. Informan Tambahan :

Nama : SH

Usia : 37 Tahun

Pekerjaan : berkebun

Informan tersebut merupakan informan tambahan. Beliau adalah salah satu KPM dalam program BPNT di dusun Jatirono Desa Kajarharjo. Sebelum melakukan wawancara peneliti memperkenalkan diri kepada KPM terkait tujuan dari melakukan wawancara. Pada saat melakukan wawancara peneliti secara langsung mendatangi rumah ibu Siti Hasanah. Informan pada saat wawancara berlangsung menjelaskan secara detail awal mula informan mendapatkan program BPNT hingga sekarang. Kemudian informan juga memperlihatkan kartu kepemilikan bahwa informan menerima Program BPNT.

g. Informan Tambahan :

Nama : YH

Usia : 48 Tahun

Pekerjaan : buruh (Penderes Karet)

Informan tersebut merupakan informan tambahan. Beliau adalah salah satu KPM dalam program BPNT di Dusun Jatirono Desa Kajarharjo. Sebelum melakukan wawancara peneliti menjelaskan maksud dan tujuan peneliti datang kerumah KPM. Informan tambahan ini sebenarnya yang menerima adalah istri dari bapak Yono Hadi. Akan tetapi dalam proses wawancara didampingi dan digantikan oleh suaminya. Karena terkendala bahasa. Dimana didalam keseharian beliau mengunakan bahasa madura. Akan tetapi

dalam proses wawancara ini dapat berjalan lancar karena suami dari penerima juga mengetahui secara jelas tentang bagaimana awalnya mendapatkan Program BPNT hingga dalam proses pengambilan Program BPNT.

h. Informan tambahan :

Nama : SJ

Usia : 52

Pekerjaan : Berkebun

Informan tersebut merupakan informan tambahan. Beliau adalah salah satu KPM dalam program BPNT di Dusun Jatirono Desa Kajarharjo. Sebelum melakukan wawancara peneliti menjelaskan maksud dan tujuan dari peneliti datang kerumah KPM. Informan tambahan ini merupakan informan penerima program BPNT dan PKH. Informan menjelaskan kepada peneliti tentang penerimaan program BPNT dan PKH. Akan tetapi peneliti dalam proses wawancara hanya fokus dalam program BPNT.

3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab. Dalam wawancara menggunakan bahan wawancara. Tujuan menggunakan bahan wawancara adalah untuk mempermudah dalam proses wawancara. Sugiono (2015:233) membagi wawancara menjadi tiga kategori yaitu:

1) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh, peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan-pertanyaan secara tertulis berikut yaitu alternatif jawaban yang telah disiapkan, dengan wawancara terstruktur setiap responden diberikan pertanyaan yang sama dan dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan alat lain yang dapat membantu.

2) Wawancara Semistruktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk kedalam wawancara yang bebas. Karena peneliti diberikan kebebasan dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur cerita dan wawancara. Peneliti hanya mengendalikan *guide interview* sehingga sangat memungkinkan pembicaraan leluasa.

3) Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini jenis semiterstruktur (*semistruktur interview*). Wawancara ini juga disebut dengan wawancara bebas, wawancara ini terwujud dalam pembicaraan-pembicaraan ringan, namun keterangan-keterangan yang diinginkan peneliti diarahkan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Dalam melakukan proses wawancara peneliti menyiapkan kerangka yang akan ditanyakan kepada informan.

Untuk mencegah meluasnya data atau informasi (tidak fokus) maka peneliti sebelumnya telah menetapkan pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian. Demi membantu kelancaran wawancara terhadap pengumpulan data, maka peneliti juga memerlukan alat pendukung untuk melakukan wawancara. Sehingga wawancara dapat tereduksi dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka diperlukan bantuan alat-alat wawancara sebagai berikut:

- a. Buku catatan, untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data atau media elektronik praktis yang dapat difungsikan sebagai alat mencatat. (bila diperlukan)
- b. *Tape Recorder*, berfungsi untuk merekam atau media elektronik praktis yang dapat difungsikan sebagai alat merekam semua percakapan atau pembicaraan dengan informan
- c. Camera, untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan perbincangan dengan informan atau sumber data. Dengan adanya

foto tersebut maka tingkat keabsahan penelitian lebih terjamin, sebab peneliti benar-benar mengumpulkan data.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan semiterstruktur. Pelaksanaan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada seluruh informan digunakan untuk mendapatkan informasi tentang Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai. Dalam hal ini peneliti mengecek hasil wawancara informan yang satu dengan informan yang lainnya. Wawancara direkam menggunakan alat perekam *mobile phone* merek OPPO A37.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data berupa sumber yang sudah ada. Menurut Sugiono (2015:82) dokumentasi mempunyai berbagai macam bentuk antara lain:

- 1) Berbentuk tulisan seperti catatan harian.
- 2) Berbentuk gambar seperti foto
- 3) Berbentuk karya seni berupa film

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang menggunakan dokumentasi digunakan untuk menyesuaikan keadaan maupun kebutuhan. Kemudian digunakan untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara.

Pada penelitian ini memanfaatkan dokumen-dokumen yang ada dikantor desa yang dijadikan sebagai penguat informasi yang peneliti dapatkan. Dokumentasi yang dapat dilihat dalam memperkuat hasil observasi dan wawancara berupa:

- a. Data penerima program BPNT
- b. Bentuk kartu
- c. Data jumlah *e-warong*
- d. Foto-foto dalam proses penyaluran program BPNT

3.6 Teknik Analisis Data

Moleong (2006:11) menyatakan bahwa deskriptif adalah suatu analisis yang menggambarkan keadaan objek penelitian dengan data yang di kumpulkan

berkemungkinan menjadi kunci penelitian. Berdasarkan paparan diatas peneliti menggunakan teknik analisis data menurut menurut Miles dan Huberman dalam Sugiono (2014:247-252) yang terdiri dari tiga alur sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Pada tahap ini peneliti memilah, menyederhanakan, dan memfokuskan data-data mentah hasil dari observasi, wawancara maupun dokumentasi yang didapat dari lokasi penelitian. Menurut Usman (2009:85) proses yang digunakan yaitu menyeleksi, menggolongkan data menggunakan transkrip penelitian yang telah dibuat untuk memperjelas, mempertegas, memfokuskan dan membuang bagian-bagian yang sama dan tidak dan tidak penting agar dapat dilakukan penyajian dan menarik kesimpulan.

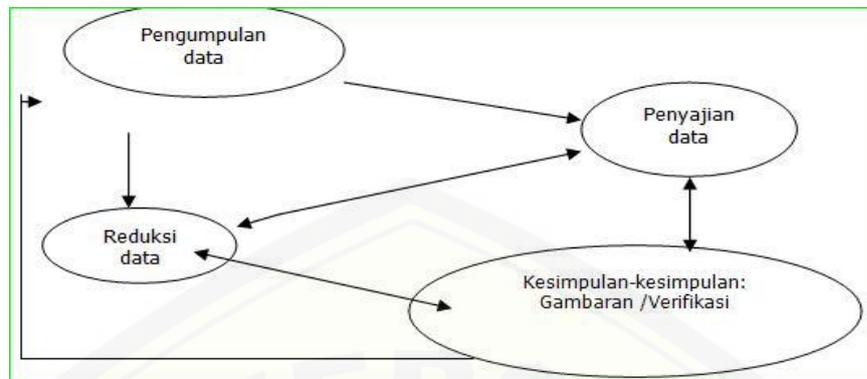
Berdasarkan pendapat diatas dalam melakukan tahap reduksi data, peneliti tidak mencantumkan semua data yang terdapat pada transkrip wawancara. Hal ini dikarenakan banyak dari wawancara yang dilakukan kesemua informan, beberapa banyak yang mengalami kesamaan sehingga peneliti memilih dan menyortir yang lebih *relevan, valid* dan lengkap terhadap fokus penelitian.

b. Penyajian Data

Ditahap ini peneliti mengubah data-data yang telah direduksi sebelumnya menjadi bentuk matriks, grafik, bagan, tabel maupun tulisan naratif sehingga mudah dipahami, disimpulkan dan diverifikasi diakhir. Peneliti dalam melakukan tahap ini yaitu mengubah data hasil reduksi menjadi naratif untuk disajikan. Hal ini bertujuan agar memudahkan dalam pemahaman maksud dari data penelitian tanpa mengurangi kualitas data tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap ini, peneliti mengecek kembali dari data yang disajikan, lalu menarik kesimpulan dari tahap sebelumnya. Penarikan kesimpulan ini merupakan suatu kegiatan penginterpretasian data yang sudah disajikan. Data yang terdapat pada tahap ini adalah data matang yang telah dilakukan verifikasi dengan teori yang berkaitan dengan triangulasi sehingga data yang diperoleh lengkap dan terpercaya.

Bagan 3.1. Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman (Idrus,2009:151)

3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangatlah penting karena dalam teknik ini berguna untuk mengukur kebenaran data agar dapat dipertanggung jawabkan. Kekuatan, keabsahandan kebenaran data yang sudah dikumpulkan serta dianalisis dapat menentukan kebenaran dalam penelitian sesuai dengan fokus penelitian (Yusuf, 2014:394). Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan validitas interbal (*credibility*) pada aspek nilai kebenaran, pada penerapannya ditinjau dari validitas eksternal, dan realibilitas pada aspek konsistensi, serta obyektivitas pada aspek naturalis (Sugiyono, 2014). Pada penelitian kualitatif, tingkat keabsahan lebih ditekankan pada data yang diperoleh. Melihat hal tersebut maka kepercayaan data hasil penelitian dapat dikatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan sebuah penelitian.

Menurut Denzim (dalam Moleong, 2014:124) membedakan tiga macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaa yaitu:

- a. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif,
- b. Triangulasi dengan metode, menurut patton (Moleong, 2014: 120) terdapat dua strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber dengan metode yang sama.

- c. Triangulasi dengan teori, menurut licoln dan guba (moleong, 2014:122) berdasarkan anggapan bahwa fakta-fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.

Pada penelitian tentang Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini untuk menguji keabsahan data dengan cara triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil dari informan pokok dengan informan tambahan serta study pustaka yang sudah ada. Dengan triangulasi ini peneliti dapat melihat temuan, sehingga dapat meminimalisir pengaturan atau informasi yang dibuat-buat dengan tujuan mendapatkan data.



BAB 5. PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, secara umum dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program BPNT di Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi, yaitu:

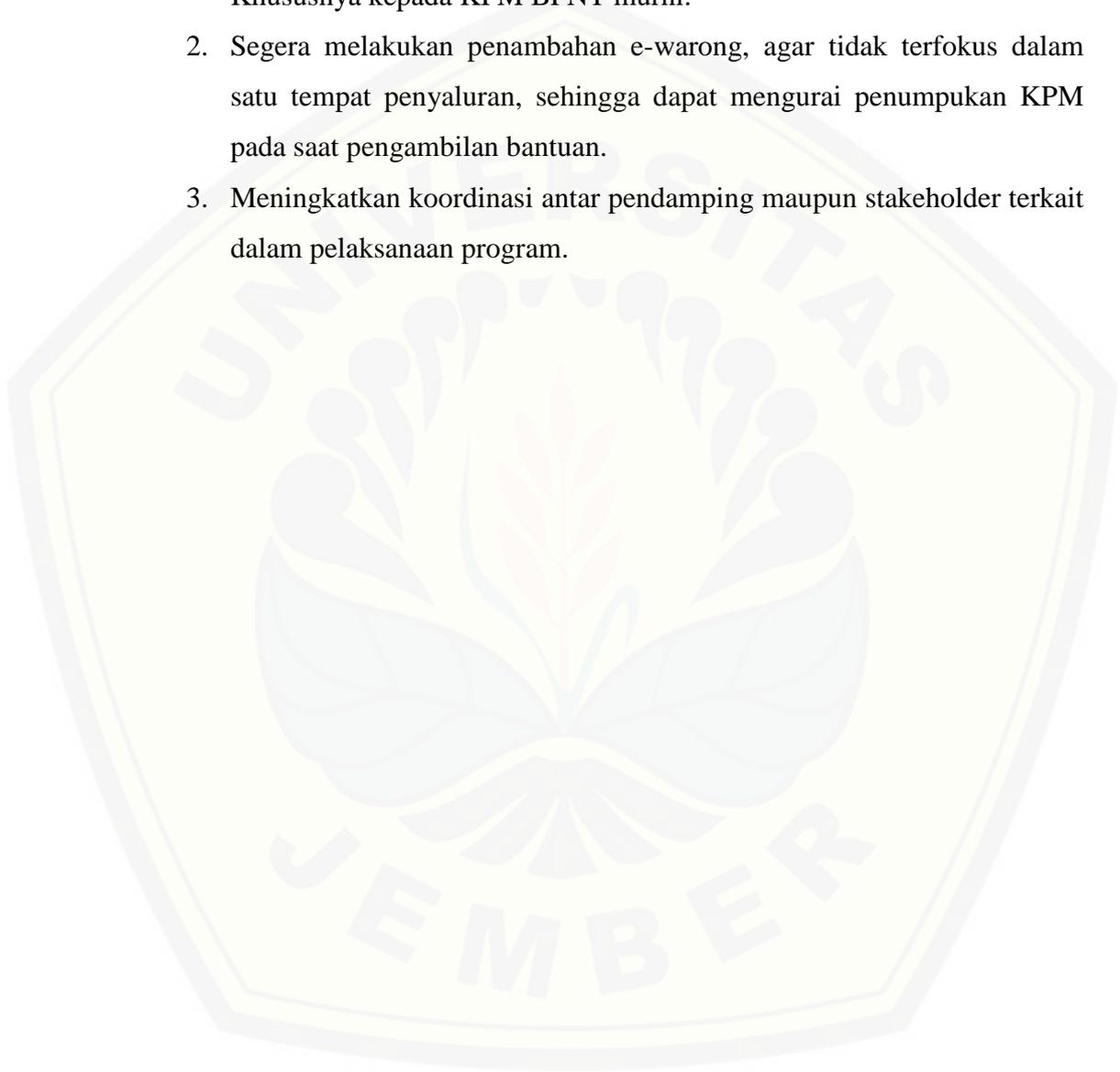
1. Program BPNT merupakan program pelayanan sosial dari pemerintah untuk masyarakat miskin. Tujuan Program BPNT yaitu untuk meningkatkan ketahanan pangan dan digunakan untuk memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan mengurangi pengeluaran keluarga bagi KPM.
2. Implementasi program BPNT sudah sesuai dengan buku panduan program BPNT tahun 2018. Meskipun dalam proses penyaluran program masih memiliki beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat maupun KPM.
3. Kurangnya *E-warong* atau agen penyalur yang menyebabkan antrian KPM dalam pengambilan bantuan.
4. Kurangnya koordinasi antar pendamping BPNT baik dr TKSK (pendamping BPNT KPM murni) maupun Pendamping sosial PKH (pendamping KPM BPNT + PKH).
5. Memberikan dampak dan manfaat yang baik untuk kesejahteraan masyarakat khususnya KPM. Akan tetapi bagi sebagian KPM juga memberikan dampak ketergantungan.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat ditarik benang merah yang berhubungan dengan kelemahan dan kelebihan dari program BPNT di kecamatan Kalibaru Khususnya di desa Kajarharjo. Dalam hal ini peneliti memiliki beberapa saran terkait Implementasi Program BPNT di Desa Kajarharjo Kecamatan

Kalibaru Kabupaten Banyuwangi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang akan uraikan sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi lebih tentang BPNT berdasarkan SOP yang sudah ditetapkan, baik pada masyarakat non KPM maupun KPM. Khususnya kepada KPM BPNT murni.
2. Segera melakukan penambahan e-warong, agar tidak terfokus dalam satu tempat penyaluran, sehingga dapat mengurangi penumpukan KPM pada saat pengambilan bantuan.
3. Meningkatkan koordinasi antar pendamping maupun stakeholder terkait dalam pelaksanaan program.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, F. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Adi, I. R. 2005. *Ilmu kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial (Pengantar Pada pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan)*. Jakarta: FISIP UI Press.
- Ahmadi, A. 2009. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bungin. B. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Grindle, M. S. (1980) *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Huda, M. 2009. *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Lukman, S. 2000. *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Jakarta : STIA LAN Press.
- Moleong, L.J. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nugroho, R. 2008. *Gender dan Strategi Pengarus-Utamanya Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwanto. A, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Administrasi Publik, dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Rukminto, I. 2008. *Intensif Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soebagyo, J. 1997. *Metode penelitian dalam teori dan praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

- Sugiyono.2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Suharto, E. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA.
- _____. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama.
- Sulisyani, A. T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gama Media.
- Suparjan & Hempri Suyatno. (2003). *Pengembangan Masyarakat dari pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Suparlan, Parsudi.1995.*Kemiskinan di Perkotaan*.Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.
- Wahab, A., Solichin.2008.*Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta:PT.Bumi Aksara.
- Yusuf , A.M. 2014.*Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat : Wacana dan Praktik*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.

Undang-Undang

- Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Kementrian Sosial RI.2018. *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai*.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
- Permensos No. 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan NonTunai.
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Internet

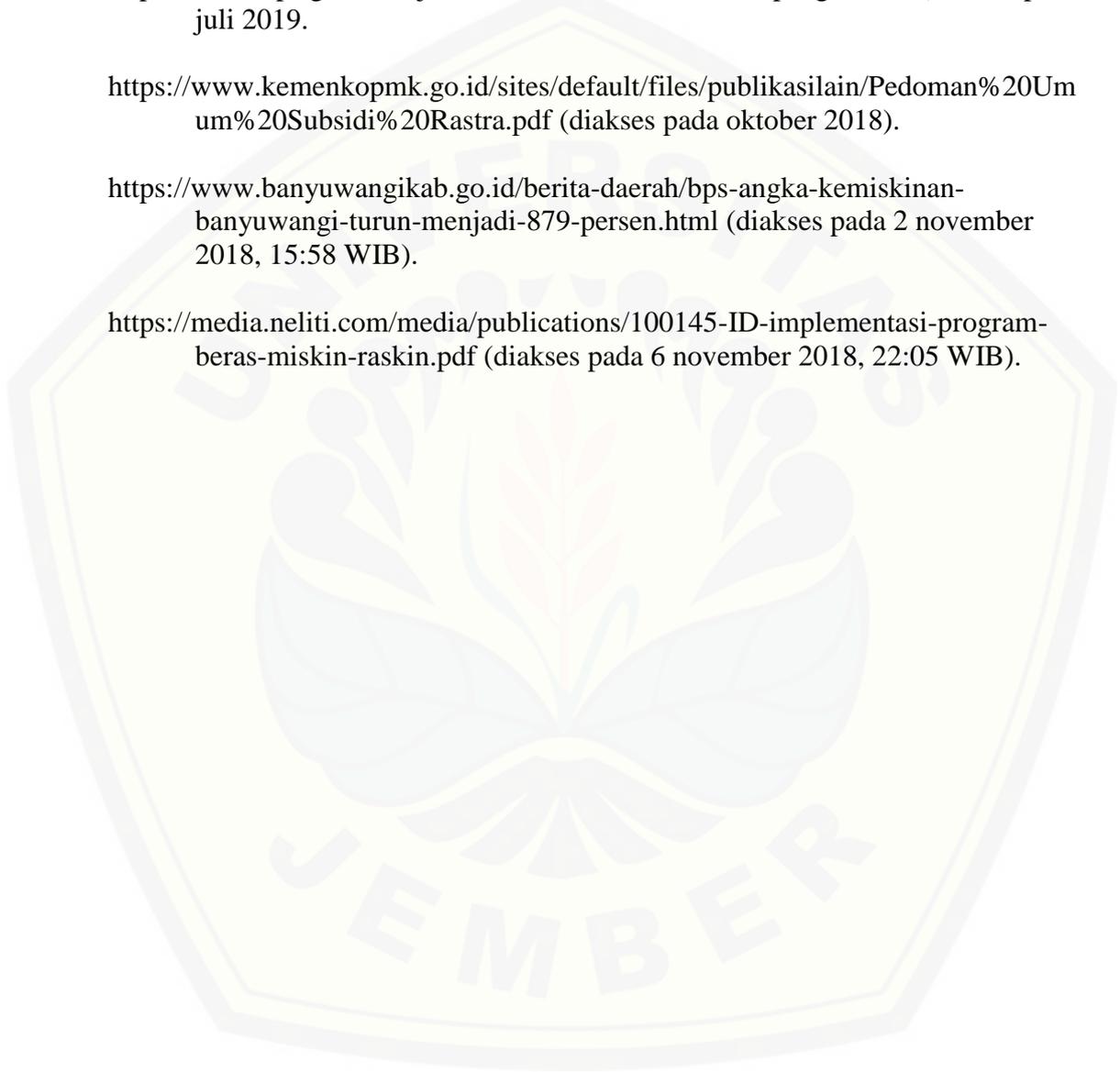
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html> (diakses pada oktober 2018).

<https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>(diakses pada juli 2019).

<https://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/publikasilain/Pedoman%20Umum%20Subsidi%20Rastra.pdf> (diakses pada oktober 2018).

<https://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/bps-angka-kemiskinan-banyuwangi-turun-menjadi-879-persen.html> (diakses pada 2 november 2018, 15:58 WIB).

<https://media.neliti.com/media/publications/100145-ID-implementasi-program-beras-miskin-raskin.pdf> (diakses pada 6 november 2018, 22:05 WIB).



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN A. GUIDE INTERVIEW

Guide Interview Informan Pokok

Informan Pokok

Nama : HR

Umur : -

Pekerjaan : TKSK (pendamping program BPNT)

Lama bekerja : Sekitar 7 tahun

Tanggal wawancara : 15 Februari 2019

1. Apakah ada tahapan persiapan sebelum program BPNT berjalan?
2. Apakah sebelum pembagian kartu ada sosialisasi kepada KPM?
3. apakah ada peran dari Desa dalam penyaluran program BPNT?
4. Apakah ada kendala pada tahap persiapan?
5. Apakah ada kendala pada saat penyaluran program BPNT?
6. Apa syarat pengambilan BPNT?
7. Apakah ada evaluasi setelah pelaksanaan program?
8. Apakah program BPNT dapat dikatakan masih tidak tepat sasaran?
9. Untuk saat ini apakah ada masyarakat yang berdaya setelah adanya program BPNT?

Informan Pokok

Nama : MRA

Umur : 24 Tahun

Alamat : Kalibaru

Pekerjaan : Pendamping PKH

1. Bagaimana tahapan program BPNT?
2. Bagaimana proses pencairan program BPNT?
3. Siapakah yang berhak mengambil bantuan di Kantor Desa ketika penyaluran program?
4. Apakah ada sosialisasi ?
5. Bagaimana proses pembukaan rekening dan kartu kombo?
6. Bagaimana tahapan awal pembuatan kartu untuk KPM?
7. Bagaimana tahapan pembuatan kartu KPM ketika kartu tersebut hilang?
8. Bagaimana pembentukan e-warong?
9. Apakah program BPNT dikatakan sudah tepat sasaran?
10. Apakah ada evaluasi?
11. Bagaimana proses penghentian bantuan kepada KPM?
12. Bagaimana proses pergantian bantuan KPM?
13. Apakah semua KPM berhak mengikuti pertemuan kelompok?

Guide Interview Informan Tambahan

Informan Tambahan

Nama : SR

Usia : 56

Pekerjaan : Kepala Desa Kajarharjo

1. Bagaimana tanggapan bapak kepala Desa Terkait program BPNT?
2. Apakah program BPNT dapat dikatakan tepat sasaran?
3. Apakah ada kendala dalam pelaksanaannya?
4. Apakah Desa memiliki peran penting dalam proses penyaluran?
5. Apakah ada evaluasi setelah adanya penyaluran BPNT?

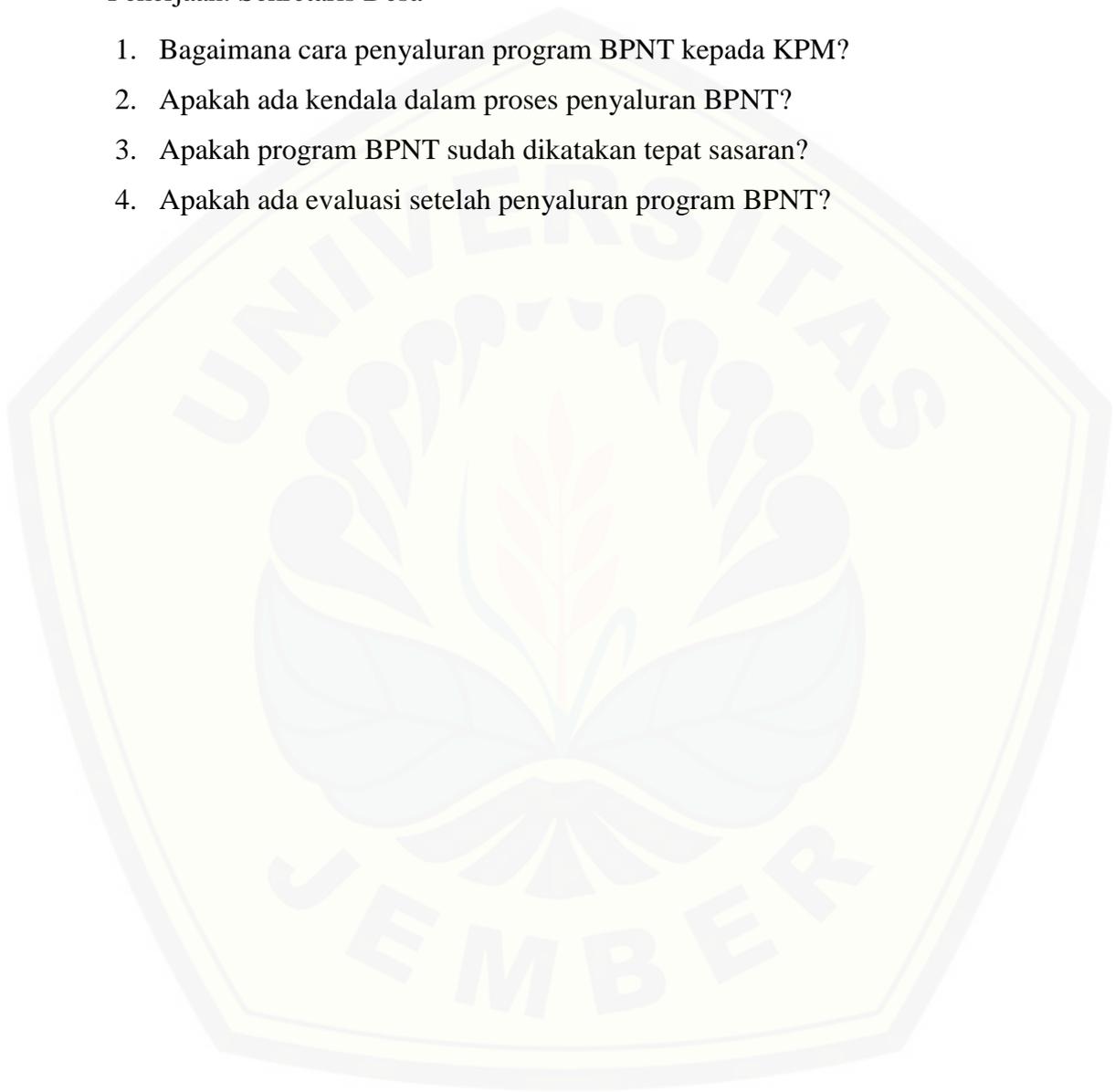
Informan tambahan

Nama : OA

Umur : 31 Tahun

Pekerjaan: Sekretaris Desa

1. Bagaimana cara penyaluran program BPNT kepada KPM?
2. Apakah ada kendala dalam proses penyaluran BPNT?
3. Apakah program BPNT sudah dikatakan tepat sasaran?
4. Apakah ada evaluasi setelah penyaluran program BPNT?



Informan tambahan

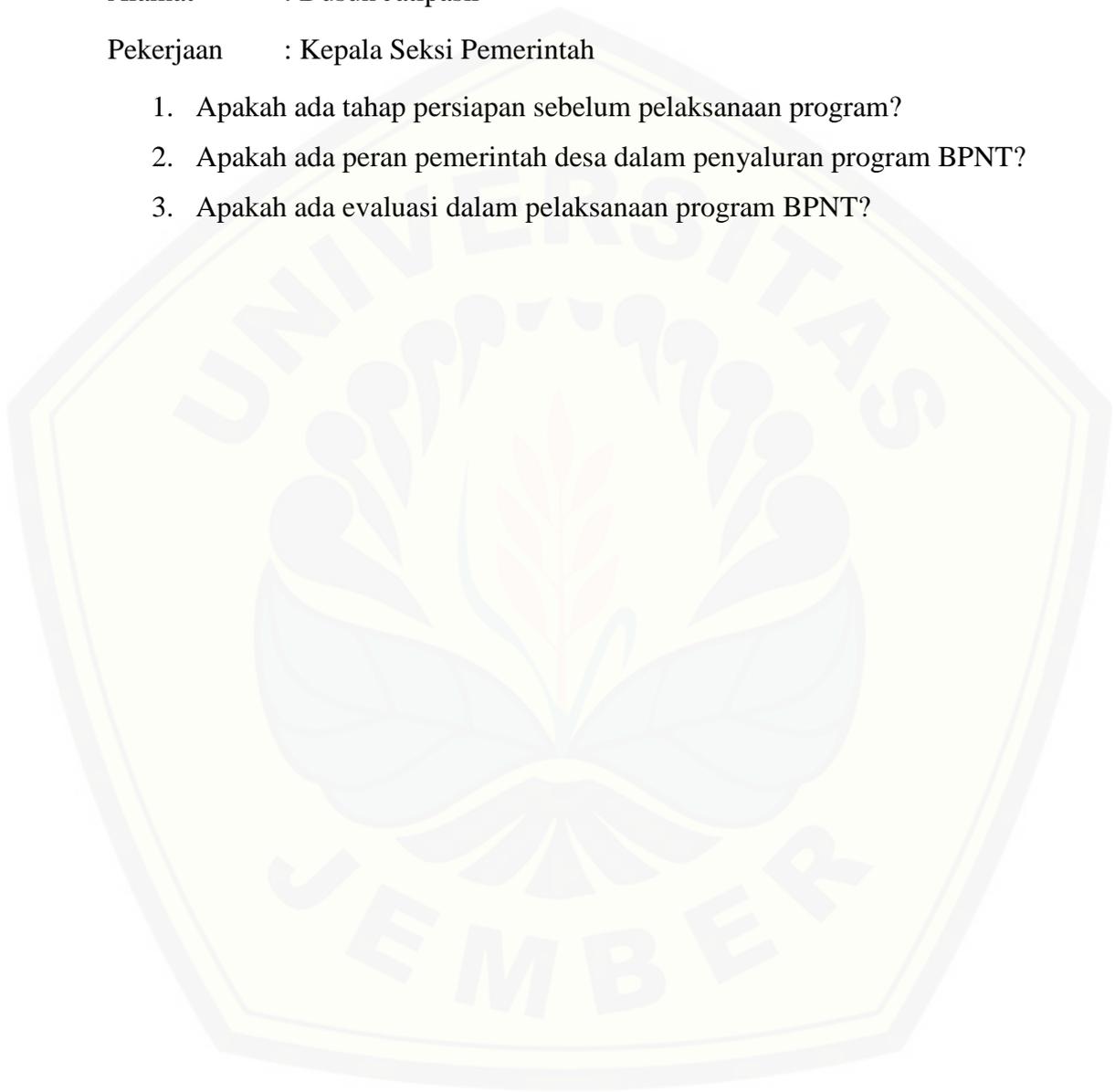
Nama : KB

Umur :-

Alamat : Dusun Jatipasir

Pekerjaan : Kepala Seksi Pemerintah

1. Apakah ada tahap persiapan sebelum pelaksanaan program?
2. Apakah ada peran pemerintah desa dalam penyaluran program BPNT?
3. Apakah ada evaluasi dalam pelaksanaan program BPNT?



Informan Tambahan

Nama : YH, SJ dan SH

Pekerjaan : Berkebun

Alamat : Dususn Jatirono

Informan tambahan (KPM)

1. Apakah bapak menerima program BPNT?
2. Bagaimana tahapan awal pembuatan kartu atau KKS?
3. Apakah kartu ibu pernah hilang? Bagaimana cara mengurus kembali KKS?
4. Bagaimana proses penerimaan program?
5. Pada tanggal berapa penyaluran program?
6. Berbentuk apakah program BPNT?
7. Dimanfaatkan untuk apa ketika bapak menerima program?
8. Apakah program BPNT dapat membantu kebutuhan sehari-hari?
9. Apakah program BPNT memiliki kemanfaatan bagi kelangsungan hidup?
10. Apakah ada keterlambatan dalam penerimaan program BPNT?

LAMPIRAN B. TRANSKIP KONDISI SAAT MELAKUKAN WAWANCARA

Di bawah ini merupakan keadaan dan kondisi saat proses wawancara semi terstruktur berlangsung dengan para informan.

Transkrip wawancara informan pokok

Nama : HR

Umur : -

Pekerjaan : TKSK (pendamping program BPNT)

Lama bekerja : Sekitar 7 tahun

Tanggal wawancara : 15 Februari 2019

Transkrip data mentah

Peneliti : Apakah adanya tahapan pelaksanaan ketika program BPNT akan dijalankan oleh kementerian RI?

Informan : Sebelumnya tahapan persiapan yang dengan kementerian adalah pada tahap adanya koordinasi tentang dasar hukum, mekanisme pelaksanaan.

Peneliti : Apakah ada tahapan persiapan sebelum program BPNT berjalan?

Informan : sebelumnya ada 2 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan pembagian kartu dan tahapan penyediaan barang. Yang pertama tahapan pembagian kartu itu program BPNT ini yang dulunya Rastra kemudian oleh kementerian RI diganti BPNT. BPNT itu juga berdasarkan Rastra tahun 2017. Jadi kartunya sudah ada di kementerian tinggal kita membagikan aja ke masyarakat. yang terjadi kemarin pada tahun 2018 kalau gak salah bulan 3 atau tidak bulan 5. Itu dibagikan kartunya, tidak semua terbagi. Jadi Kajarharjo itu kurang lebih 1329 KPM. Yang pertama dibagikan kurang lebih 794 KPM, karna apa kartunya masih ada dikementerian. Setelah itu dibagikan, dicairkan kalau gak salah bulan 7. Kemudian yang kedua pelaksanaan dicairkan dan di handel oleh e-warong. *E-warong* itu terdiri dari beberapa KPM baik PKH dan BPNT murni, juga disitu ada PSM.

Peneliti : Apakah sebelum pembagian kartu ada sosialisasi kepada KPM?

Informan : sosialisasi, hanya kita mengumpulkan semua kadus bahwa pada tanggal ini ada pembagian KKS (kartu keluarga sejahtera) yang diberikan kepada masyarakat yang sekarang Rastra dan diganti BPNT dengan menggesek kartu dan diberikan beras dan telur. Karna itu sudah ada pedumnya harus ada beras dan telur.

Peneliti : Bagaimana proses pembentukan *e-warong*?

Informan : Sebenarnya *e-warong* belum lama terbentuk untuk di Desa Kajarharjo. Berhubung dalam buku pedoman yang harus menyalurkan *e-warong* maka kami untuk Desa Kajarharjo membentuk *e-warong* dalam penyaluran program BPNT.

Peneliti : apakah ada peran dari Desa dalam penyaluran program BPNT?

Informan : jelas desa itu berperan penting karena dalam lingkup desamasyarakat itu terakhir pimpinan dari masyarakat adalah desa. Secara otomatis desa terlibat untuk penyaluran ini. Istilahnya bukan terlibat langsung tapi pihak desa membantu untuk menyalurkan BPNT kepada KPM. Mungkin jumlah KPM banyak jadi terus terang saja Desa harus ikut campur membantu. Akan tetapi bukan di handel oleh orang desa, tapi BPNT di handel oleh *e-warong*.

Peneliti : Apakah ada kendala pada saat penyaluran program BPNT?

Informan : kalau implementasi kepada masyarakat sebetulnya tidak ada kendala, namun tempat aja yang kurang kompak. Karna kalau masyarakat sekitar kelurahan atau Desa Kajarharjo mungkin lebih cepat penyalurannya 1 hari selesai. Kadang-kadang kita sampai menunggu 2 hari baru masyarakat bisa mengambilnya. Seperti masyarakat di Dusun Gunung Raung mungkin ada kendala. Sedangkan kita juga terbentur waktu maksudnya seperti penyaluran hari ini hari jumat. Kadang-kadang orang-orang tidak mengambil lagi tapi datang besoknya. Jadi kita juga sering menunggu. Karna kita dari dinas sosial juga istilahnya sebagai untuk mengontrol satu,. Saya ditugaskan oleh kementrian untuk 3T. Tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas dan kuantitas.

Peneliti : Apakah ada evaluasi setelah pelaksanaan program?

Informan : Jelas ada evaluasi karena evaluasi atau verifikasi data, karena masyarakat yang menerima bantuan BPNT semuanya memang layak untuk dibantu. Jadi untuk dinas sosial sendiri per 6 bulan ada verifikasi data. Jadi verifikasi data itu untuk mengkongkritkan mengfalsifikasi data kepada masyarakat yang betul betul sudah tidak layak dibantu BPNT dialihkan kembali kemasyarakat yang kurang mampu. Evaluasi sudah menghasilkan beberapa KPM yang divalidasi dan sampai saat ini pergantian untuk verifikasi data yang dialihkan kepada masyarakat yang layak untuk dibantu belum keluar. Untuk saat ini yang sudah diverifikasi sudah tidak menerima karena kartunya sudah dikembalikan kepada kementerian pusat dan diganti dengan KPM baru yang kartunya belum keluar.

Peneliti :Apakah program BPNT dapat dikatakan tidak tepat sasaran?

Informan : ya ada, salah satu atau salah dua atau salah tiga masyarakat atau KPM yang seyogyanya itu sudah tidak layak menerima dan digantikan KPM yang lain masih menerima. Kurang lebih ya beberapa persen lah. Nantinya akan diverifikasi.

Peneliti: Apakah ada kendala pada tahap persiapan?

Informan : Kalau kendala persiapan ada, karena terus terang aja *e-warung* itu tidak dimodali oleh Desa, tidak mendapatkan bantuan dari Desa, tidak mendapatkan suntikan dari Desa, kita hanya mengandalkan setelah pencairan untuk membayar semua yang diberikan kepada KPM berupa beras dan telur. E-warung berusaha mencari suplaiyer kepada pabrik, kepada seleb yang mau diutang dulu untuk diberikan kepada masyarakat. bukan desa yang menyuntik dana. Namun kita betul betul atas dasar kepercayaan kepada pabrik ataupun suplaiyer yang memberikan bahan. Kendalanya kalau kita tidak dipercaya oleh pabrik yang memberikan bahan masyarakat akan terlunta-lunta, karena waktu pencairan pas hari H tidak ada barang. Desa hanya membantu untuk penyalurannya BPNT tidak membantu dana.

Peneliti : Apa syarat pengambilan BPNT?

Informan : Syarat pengambilan program BPNT adalah foto kopi KTP dan KKS karena agar tidak ada kekeliruan pengambilan. Untuk kartunya setiap KK hanya satu kartu, akan tetapi ada 2 kartu akan tetapi bantuannya yang berbeda. satu program BPNT satu PKH. Karena yang mendapat PKH berhak mendapat BPNT.

Peneliti : Apakah program BPNT dapat memberdayakan masyarakat?

Informan : Jelas memberdayakan masyarakat, karena adanya BPNT, satu dapat membantu masyarakat kurang mampu meskipun nominal Rp. 110.000 tapi kan membantu pengeluaran masyarakat satu bulan tersebut. Sedangkan penghasilannya dapat ditabung untuk kehidupan yang lebih layak atau nantinya dibikin warung. Jadi dampaknya sangat positif. Kalau orangnya ingin maju berfikir seperti itu.

Peneliti : Untuk saat ini apakah ada masyarakat yang berdaya setelah adanya program BPNT?

Informan : Kalau saya pendamping BPNT, jadi tidak kerumah rumah. Mungkin kalau ada SK yang menyatakan setelah adanya BPNT, TKSK untuk mensurvei bagaimana keadaan itu mungkin saya akan kerumah-rumah dan menanyakan tentang kemanfaatannya.

Informan Pokok

Nama : MRA

Usia : 24 Tahun

Alamat : Kalibaru

Pekerjaan : Pendamping PKH

Peneliti : Bagaimana tahapan program BPNT?

Informan : Awalnya itu pendamping bantuan mengkroscek data penerima bantuan atau yang dinamakan memverifikasi dengan menggandeng pihak terkait seperti (kepala desa, kepala dusun, RT). Setelah data diverifikasi baru pusat menentukan penerima bantuan yang selanjutnya akan dibagikan kartu sakti atau KKS (kartu keluarga sejahtera) karena bantuannya tipe non tunai, sehingga bekerja sama dengan pihak bank himbara. Setelah itu kartu baru dibagikan ke KPM.

Peneliti : Bagaimana proses pencairan program BPNT?

Informan : karena bantuan tersebut non tunai, maka pencairannya melalui agen-agen yang sudah ditetapkan dengan kriteria yang sudah ditentukan. Dalam pencairannya tidak boleh berupa uang tunai. Melainkan bentuk sembako (beras dan telur) seharga bantuan.

Peneliti : Siapakah yang berhak mengambil bantuan di Kantor Desa ketika penyaluran program?

Informan : untuk penerima tidak bisa digantikan dengan orang lain. karena berkaitan dengan data perbankan dan menghindari penyalahgunaan atau tidak tepat sasaran.

Peneliti : Apakah ada sosialisasi ?

Informan : sosialisasi sudah dilakukan, selama ini kami pendamping KPM BPNT yang sekaligus PKH atau bukan murni mensosialisasikan dalam setiap pertemuan kelompok di tiap bulannya. Terkait besaran bantuan, cara pencairan maupun pengurusan masalah kehilangan atau tidak cair.

Peneliti : Bagaimana proses pembukaan rekening dan pembuatan kartu?

Informan : Pada pembukaan rekening melalui proses yaitu mulai dari pusat hingga kedesa. Dalam proses ini memerlukan koordinasi dengan baik, baik dari pemerintah, bank penyalur, pendamping, dan KPM. Kemudian alur dari pembukaan rekening yaitu penerimaan data penerima bantuan sosial untuk registrasi kepada bank penyalur, kemudian bank penyalur mendistribusikan starter pak dan kit kartu kombo. Kemudian untuk pendamping program harus koordinasi dengan pemerintah dan penerima bantuan. Untuk kks diterima oleh KPM pada saat tahapan tersebut sudah selesai dilakukan.

Peneliti : Bagaimana tahapan awal pembuatan kartu untuk KPM?

Informan : Untuk mendapatkan kartu, awalnya adalah menunggu data dari pusat turun, kemudian diverifikasi oleh pendamping dari program. Dan hasil verifikasi itu kemudian dikirim di pusat untuk seleksi lanjutan. Setelah keluar data penerima manfaat tersebut dilanjutkan koordinasi dengan bank penyalur. Selanjutnya KPM diundang di kantor desa.

Peneliti : Bagaimana tahapan pembuatan kartu KPM ketika kartu tersebut hilang?

Informan : ketika kartu yang dimiliki KPM hilang, ya harus membuat lagi. Yang pertama ya harus minta surat dari kepolisian sesuai dengan arahan pendamping. Terus selanjutnya pendamping memberikan surat pengantar dan dilaporkan ke Bank BTN untuk pengajuan penetakan kartu baru. Untuk di Banyuwangi yang mengurus kartu antara bank himbara ya bank BTN. Kemudian tunggu sampai kartu tersebut jadi.

Peneliti : Bagaimana pembentukan *e-warong*?

Informan : Pembentukan *e-warong* atau agen penyalur harus menganut kriteria yang ada. Akan lebih baik jika KPM bisa berkelompok untuk membuat sebuah usaha bersama (Kube) yang nantiya sekaligus mengcover penyaluran bantuan. Hanya saja kendalanya kebanyakan pihak-pihak terkait atau pihak pemberi ijin mempersulit usaha KPM. Termasuk juga sulitnya mendapatkan mesin EDC (mesin gesek dari pihak bank).

Peneliti : Apakah program BPNT dikatakan sudah tepat sasaran?

Informan : untuk tepat sasaran di Kalibaru sendiri 90% sudah tepat sasaran. Yang 10 % lagi, KPM yang memiliki perubahan perekonomian keluarga, dulu kurang mampu sekarang sudah mampu akan tetapi mereka kebanyakan tidak sadar akan keadaannya. Sehingga mencari cara untuk tetap menerima bantuan. Untuk KPM BPNT yang sekaligus PKH, saya rasa lambat laun sudah tertangani, terbukti dengan beberapa KPM PKH yang sudah tergraduasi mandiri (menjadi alumni KPM karena perekonomian sudah naik)

Peneliti : Apakah ada evaluasi?

Informan : a. Dibutuhkan sosialisasi, koordinasi, maupun kerjasama baik pendamping (BPNT murni atau TKSK maupun BPNT dan PKH), agen penyalur, pihak perbankan, agar permasalahan dan pemberi layanan kepada masyarakat bisa efektif dan efisien. b. Kesadaran dari berbagai pihak dalam menjalankan sesuai sop yang berlaku. Baik itu barang, penyalur program maupun penentuan agen penyalur.

Peneliti : Bagaimana proses penghentian bantuan kepada KPM?

Informan : penghentian bantuan kepada KPM (graduasi) meliputi dua hal yang pertama karena KPM sudah sadar atau merasa banyak yang lebih membutuhkan. Dan yang kedua karena taraf hidupnya sudah memenuhi syarat khususnya perekonomian keluarga dibanding tanggungan keluarga sudah diatas rata-rata.

Peneliti : Bagaimana proses pergantian bantuan KPM?

Informan : jika ada warga yang layak dapat bantuan tapi belum dapat bantuan, maka bisa diajukan melalui musyawarah desa untuk dimasukan ke data warga layak menerima bantuan dalam lingkup desa (data BDT). Yang nantinya diajukan melalui dinas. Untuk penerima yang sudah meninggal bantuannya akan dihentikan.

Peneliti : Apakah semua KPM berhak mengikuti pertemuan kelompok?

Informan : KPM BPNT murni tidak memiliki kewajiban pertemuan kelompok disetiap bulannya. Sedangkan KPM PKH memiliki kewajiban pertemuan kelompok tiap bulan. Dan pendampingnya juga berbeda anantara dua jenis KPM tersebut.

Informan tambahan

Nama : SR

Usia : 56

Pekerjaa : Kepala Desa Kajarharjo

Peneliti : Bagaimana tanggapan bapak kepala Desa Terkait program BPNT?

Informan : BPNT sangat membantu masyarakat utamanya untuk masyarakat yang miskin membutuhkan seperti janda janda. Memang kami selaku pemerintah desa berharap dulu setelah dihapusnya raskin masyarakat banyak mengeluh. Sekarang dengan adanya BPNT dan PKH sangat membantu. Apalagi yang PKH, mendapatkan dana dan juga beras. Lha sedangkan BPNT hanya mendapatkan beras dan telur yang nilainya Rp. 110.000. Lha untuk Desa Kajarharjo yang ditargetkan dari 3000 yang menerima masih mendapatkan separuhnya sekitar 1300. Sehingga masyarakat yang sangat memerlukan tapi belum. Saya terus mengajukan BPNT ke Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Sosial. Tapi untuk Program BPNT itu sendiri saya berharap yang sudah kelas menengah , yang boleh dikatakan ekonominya sudah mulai bagus itu bisa dialihkan.bisa dialihkan melalui MUSDes. Cuma prosesnya sangat panjang. Harus kekabupaten dulu, kabupaten melakukan verifikasi nanti turunnya itu. Kami sudah mengajukan kemarin 80 orang itu pengganti.

Peneliti : Apakah program BPNT dapat dikatakan tepat sasaran?

Informan: Ada, jadi di Desa kami ada yang sudah, sebenarnya bukan tidak layak tapi boleh lah dialihkan. Menurut pandangan kami, masyarakat ataupun tokoh masyarakat bahwa ekonominya sudah bagus. Hanya ada yang belum bagus harus dialihkan.

Peneliti : Apakah ada kendala dalam pelaksanaannya?

Informan : Ada kendala, karna di Desa kami EDC nya masih satu, *e-warong* belum bisa menjangkau jauh. Karna Desa Kajarharjo itu memiliki 6 Dusun. Dan ada 2 Dusun yang jauh. Sedangkan dalam penyalurannya di Desa makanya ada yang minta bantuan orang lain (ngojek). Misalnya EDC dibawa ke Dusun maka susah karena jaringannya tidak bagus. Maka kami sudah musyawarah dengan

Dinas Sosial, dengan TKSK dengan pendamping Desa, dengan Kepala Dusun, tetap pelaksanaannya di Kantor Desa.

Peneliti : Apakah Desa memiliki peran penting dalam proses penyaluran?

Informan : Sangat. Desa itu berperan penting untuk penyeluran. Memang benar *e-warong* itu yang menangani semuanya. Pada saat menerima BPNT kesulitan dalam bidang administrasinya maka Desa harus turun tangan. Apalagi pada saat penerimaan kartu, ada masyarakat kk sudah kadaluarsa maka disana harus ada surat pernyataan dan surat kuasa. Kalau pada saat penyaluran Desa hanya memantau saja. Karena pelaksanaannya *e-warong*.

Peneliti : Apakah Desa membantu proses administrasi?

Informan: Desa membantu dalam bidang administrasi. Seperti ada kartu keluarga yang kadaluarsa atau hilang. Maka desa membantu agar KPM tetap mendapatkan BPNT. Karena proses pengambilan kan harus membawa foto copy kartu keluarga dan KTP.

Peneliti : Apakah ada evaluasi setelah adanya penyaluran BPNT?

Informan : Ya sebetulnya seperti itu. Yang selalu koordinasi adalah TKSK dan pendamping Desa. Kalau *e-warong* kan hanya sebagai penyalur. Tapi kalau pendamping Desa TKSK selalu melakukan koordinasi. Melakukan evaluasi kinerjanya bagaimana, trus berasnya bagaimana, trus penyalurannya bagaimana.

Informan Tambahan

Nama : OA

Umur : 31

Pekerjaan: Sekretaris Desa

Peneliti : Bagaimana cara penyaluran program BPNT kepada KPM?

Informan : Penyaluran melalui e-warong. KPM langsung datang ke Desa.

Peneliti : Bagaimana tahap persiapan sebelum proses penyaluran program?

Informan : Pada tahap persiapan, pengurusan data KPM, administrasi maupun yang lain yang diperlukan.

Peneliti : Apakah ada kendala dalam proses penyaluran BPNT?

Informan : Kendalanya adalah waktu, dalam penyalurannya tambah panjang waktunya, biasanya 3 jam selesai program BPNT ini sampai 2 atau 3 hari. Selain itu kondisi jalannya susah. Makanya kendalanya transportasi.

Peneliti : Apakah program BPNT sudah dikatakan tepat sasaran?

Informan : Kalau masalah itu banyak yang belum.

Peneliti : Apakah ada evaluasi setelah penyaluran program BPNT?

Informan : biasanya evaluasi ada setelah penyaluran program BPNT dan sebelum pas waktu mempersiapkan bahan-bahan yang akan diberikan kepada KPM

Informan tambahan

Nama : KB

Umur : -

Alamat : Dusun Jatipasir

Pekerjaan : Kepala Seksi Pemerintah

peneliti : Apakah ada peran pemerintah desa dalam penyaluran program BPNT?

Informan : Iya, ya gimana ya kalau disini itu repot. Pasrah kepada *e-warong* kadang-kadang masyarakat lebih percaya kepada desanya. Ya meskipun gak mau ikut tetap harus ikut. Atas permintaan masyarakat sendiri.

Peneliti : Bagaimana program BPNT menurut bapak?

Informan : Program BPNT merupakan program lanjutan dari Rastra. Yang mana program tersebut berupa beras dan telur. Program tersebut dikeluarkan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu.

Peneliti : Bagaimana awalnya adanya program BPNT?

Informan : sebenarnya program BPNT lanjutan dari program Rastra, kalau gak salah tahun 2017. Ada UU yang ngatur tentang rastra. Kemudian sama pemerintah diganti dengan program BPNT.

Peneliti : Apakah adanya sosialisasi diawal sebelum berjalannya program BPNT kepada KPM?

Informan: Ada, sosialisasi diadakan ketika pergantian program Rastra ke program BPNT. Sosialisasi kepada KPM dilakukan oleh kepala dusun masing masing.

Peneliti : Apakah ada tahap persiapan sebelum pelaksanaan program?

Informan : Tahap persiapan yang mempersiapkan adalah *e-warong*. Desa hanya membantu. Tapi untuk penyaluran tetap *e-warong* dan yang dampingi Desa.

Peneliti : Bagaimana awalnya terbentuk *e-warong*?

Informan : pada awalnya program BPNT ini tidak ada *e-warong*. Kemudian seiring berjalannya waktu *e-warong* sangat dibutuhkan dan sebenarnya *e-warong* yang menjadi penyalur program. Makanya dibentuk *e-warong*.

Peneliti : Apakah ada evaluasi dalam pelaksanaan program BPNT?

Informan : Ya tergantung, kadang dilaksanakan sebelum penyaluran program.

Kadang setelah penyaluran program.



Informan tambahan

Nama : YH

Usia : 48 Tahun

Alamat : Dusun Jatirono

Pekerjaan : Penderes Karet

Peneliti : Apakah bapak menerima program BPNT?

Informan : Menerima,

Peneliti : Bagaimana proses penerimaan program?

Informan : Saya langsung ke desa

Peneliti : Pada tanggal berapa penyaluran program?

Informan : Lupa yang kemarin itu tanggal berapa, sekitar akhir bulan.

Peneliti : Berbentuk apakah program BPNT?

Informan : Berasnya 10 kg, telurnya 3.

Peneliti : Dimanfaatkan untuk apa ketika bapak menerima program?

Informan : Ya dimasak, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Peneliti : Apakah program BPNT dapat membantu kebutuhan sehari-hari?

Informan : Ya alhamdulillah cukup,

Peneliti : Apakah program BPNT memiliki kemanfaatan bagi kelangsungan hidup?

Informan : Program BPNT sedikit mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya program BPNT sangat terbantu sekali.

Peneliti : Apakah ada keterlambatan dalam penerimaan program BPNT?

Informan : Tidak, alhamdulillah lancar.

Informan tambahan

Nama : SJ

Usia : 52 Tahun

Alamat : Dusun Jatirono

Pekerjaan : berkebun

Peneliti : pada tanggal berapa bapak menerima program BPNT?

Informan : Lupa ya, kayaknya setiap tanggal 26.

Peneliti : Bagaimana proses penerimaan program?

Informan : Ya pak kadus tunggu di desa, yang menerima ke desa.

Peneliti : Dimanfaatkan untuk apa ketika bapak menerima program?

Informan : Ya dimasak,

Peneliti : Bagaimana kualitas dari program BPNT?

Informan : Kualitas dari berasnya bagus.

Peneliti : Apakah program BPNT dapat membantu kebutuhan sehari-hari?

Informan : Alhamdulillah membantu.

Peneliti : Apakah ada kendala dalam proses penerimaan program?

Informan : Tidak ada

Peneliti : Apakah ada sosialisasi sebelum adanya program ini?

Informan : Ada, dirumahnya pak kadus. Diawalnya.

Informan tambahan

Nama : SH

Usia : 37 Tahun

Alamat : Dusun Jatirono

Pekerjaan : Berkebun

Peneliti : Apakah ibu mendapatkan program BPNT?

Informan : Dapat

Peneliti : Bagaimana tahapan awal pembuatan kartu atau KKS bu?

Informan : Begini mbak, waktu itu awal ibu mendapatkan, ibu disuruh ke balaidesa langsung. Terus yang mengurus itu pendamping program katanya dan bapak kepala dusun. Saya hanya disuruh membawa KTP dan Kartu Keluarga saja.

Peneliti : Apakah kartu ibu pernah hilang? Bagaimana cara mengurus?

Informan : Pernah mbak, lupa naruh. Ya pas tau kartu yang hilang langsung lapor ke pendamping, ya harus membuat lagi. Terus saya disuruh minta surat dari kepolisian sama pendamping mbak. Paswaktu itu pendamping ngasih surat pengantar dan dilaporkan ke Bank mbak. Kemudian ditunggu sampai kartu jadi. Gitu aja mbak.

Peneliti : Setiap taggal berapa ibu menerima program?

Informan : Ya gak tau, pokok akhir bulan gitu

Peneliti : Bagaimana proses penerimaan program BPNT?

Informan : ketika proses penerimaan ya langsung kedesa. Akan tetapi harus menunggu pemberitahuan dari kepala dusun.

Peneliti : Berbentuk apakah program BPNT?

Informan : Satu bulan 10 kg telur 3.

Peneliti : Bagaimana kualitas dari program BPNT?

Informan : Kualitasnya bagus. Dari pada yang dulu gak terlalu bagus.

Peneliti : Apakah program ini sangat membantu kebutuhan sehari-hari?

Informan : Sangat membantu

Peneliti : Dimanfaatkan untuk apa program BPNT?

Informan : Ya dimasak mbak,

Peneliti : Apakah ada kendala dalam proses penerimaan program?

Informan: Enggak mbak

Peneliti : Apakah ada sosialisasi sebelum adanya program BPNT?

Informan : Ada, dulu dirumahnya pak kadus.



LAMPIRAN C. ANALISIS DATA

Kategorisasi	Transkrip wawancara	Reduksi data	Display data	Kesimpulan dan verifikasi data
<p>Persiapan pelaksanaan</p>	<p>Sebelumnya tahapan persiapan yang dengan kementerian adalah pada tahap adanya koordinasi tentang dasar hukum, mekanisme pelaksanaan. (HR)</p> <p>Awalnya itu pendamping bantuan mengkoscek data penerima bantuan atau yang dinamakan memverifikasi dengan menggandeng pihak terkait seperti (kepala desa, kepala dusun, RT). Setelah data diverifikasi baru pusat menentukan penerima bantuan yang selanjutnya akan dibagikan kartu sakti atau KKS (kartu</p>	<p>Tahapan persiapan dengan kementerian, yaitu tahapan koordinasi tentang dasar hukum, mekanisme pelaksanaan. (HR)</p> <p>Awalnya pendamping bantuan mengkoscek data penerima bantuan atau yang dinamakan memverifikasi dengan pihak terkait seperti (kepala desa, kepala dusun, RT). Setelah data diverifikasi baru pusat menentukan penerima bantuan yang selanjutnya akan dibagikan kartu sakti atau KKS (kartu keluarga sejahtera) karena bantuannya tipe non tunai, sehingga bekerja sama dengan pihak bank himbara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tahapan persiapan dengan kementerian ➤ Dasar hukum ➤ Mekanisme pelaksanaan. (HR) ➤ pendamping bantuan mengkoscek data penerima bantuan atau yang dinamakan memverifikasi dengan pihak terkait ➤ Setelah data diverifikasi baru pusat menentukan penerima bantuan yang selanjutnya akan dibagikan kartu sakti atau KKS ➤ bantuannya tipe 	<p>Tahapan persiapan dengan kementerian tentang dasar hukum dan mekanisme pelaksanaan (HR)</p> <p>Pendamping bantuan mengkoscek data penerima bantuan atau yang dinamakan memverifikasi dengan pihak terkait. Setelah data diverifikasi baru pusat menentukan penerima bantuan yang selanjutnya akan dibagikan kartu sakti atau KKS. Kemudian bantuannya tipe non tunai, sehingga bekerja sama dengan pihak bank himbara.</p> <p>Kemudian kartu dibagikan ke KPM (MRA)</p> <p>Desa membantu pengurusan kartu keluarga dan KTP sebagai syarat pengambilan BPNT bagi KPM. (SH)</p> <p>Tahap persiapan pengurusan administrasi KPM dilakukan sebelum penyaluran program.</p>

	<p>keluarga sejahtera) karena bantuannya tipe non tunai, sehingga bekerja sama dengan pihak bank himbara. Setelah itu kartu baru dibagikan ke KPM. (MRA)</p> <p>Desa membantu dalam bidang administrasi. Seperti ada kartu keluarga yang kadaluarsa atau hilang. Maka desa membantu agar KPM tetap mendapatkan BPNT. Karena proses pengambilan kan harus membawa foto copy kartu keluarga dan KTP. (SH, kepala desa)</p> <p>Pada tahap persiapan, pengurusan data KPM, administrasi maupun yang lain</p>	<p>Setelah itu kartu baru dibagikan ke KPM. (MRA)</p> <p>Desa membantu bidang administrasi. Seperti, pengurusan kartu keluarga, KTP. Karena dalam pengambilan BPNT harus menggunakan foto copy kartu tersebut. (SH)</p> <p>Pada tahap persiapan, pengurusan data administrasi KPM. (OA)</p> <p>Desa berperan penting dalam lingkup masyarakat. secara langsung desa terlibat dalam penyaluran program BPNT.</p> <p>Bukan terlibat dalam penyalurannya, mungkin dalam proses atau tahap yang lainnya.</p>	<p>non tunai, sehingga bekerja sama dengan pihak bank himbara.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kemudian kartu dibagikan ke KPM (MRA) ➤ Desa membantu pengurusan administrasi ➤ Pengurusan KTP dan Kartu keluarga (SH) ➤ Tahap persiapan, pengurusan data administrasi KPM. (OA) ➤ Desa berperan penting dalam lingkup masyarakat ➤ Desa terlibat dalam proses atau tahapan selain penyaluran. (HR) 	<p>(OA)</p> <p>Desa berperan penting dalam lingkup masyarakat</p> <p>Desa terlibat dalam proses atau tahapan selain penyalura. (HR)</p>
--	--	--	---	---

	<p>yang diperlukan. (OA)</p> <p>jelas desa itu berperan pentingkarna dalam lingkup desamasyarakat itu terakhir pimpinan dari masyarakat adalah desa. Secara otomatis desa terlibat untuk penyaluran ini. Istilahnya bukan terlibat langsung tapi pihak desa membantu untuk menyalurkan BPNT kepada KPM. Mungkin jumlah KPM banyak jadi terus terang saja Desa harus ikut campur membantu. Akan tetapi bukan di handel oleh orang desa, tapi BPNT di handel oleh e-warong. (HR)</p>	(HR)		
Pembentukan	Sebenarnya e-warong	e-warong belum lama	➤ E-warong di desa	e-warong di Desa Kajarharjo masih

<p>e-warong</p>	<p>belum lama terbentuk untuk di Desa Kajarharjo. Berhubung dalam buku pedoman yang harus menyalurkan e-warong maka kami untuk Desa Kajarharjo membentuk e-warong dalam penyaluran program BPNT. (HR)</p> <p>Pembentukan e-warong atau agen penyalur harus menganut kriteria yang ada. Akan lebih baik jika KPM bisa berkelompok untuk membuat sebuah usaha bersama (Kube) yang nantiya sekaligus mengcover penyaluran bantuan. Hanya saja kendalanya kebanyakan pihak-</p>	<p>terbentuk untuk di Desa Kajarharjo. Dalam buku pedoman yang harus menyalurkan e-warong maka untuk Desa Kajarharjo membentuk e-warong dalam penyaluran program BPNT. (HR)</p> <p>Pembentukan e-warong atau agen penyalur harus sesuai kriteria yang ada. Akan lebih baik jika KPM bisa berkelompok untuk membuat sebuah usaha bersama (Kube) yang nantiya mengcover penyaluran bantuan. Hanya saja kendalanya kebanyakan pihak pemberi ijin mempersulit usaha KPM. Termasuk juga sulitnya mendapatkan mesin EDC. (MRA)</p>	<p>Kajarharjo masih belum lama terbentuk</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ E-warong dibentuk sesuai dengan buku pedoman. (HR) ➤ Pembentukan e-warong atau agen penyalur harus sesuai kriteria yang ada ➤ KPM bisa berkelompok untuk membuat sebuah usaha bersama (Kube) yang nantiya mengcover penyaluran bantuan. ➤ kendalanya kebanyakan pihak pemberi ijin mempersulit usaha KPM. Termasuk juga sulitnya mendapatkan mesin EDC. 	<p>belum lama terbentuk. Terbentuknya e-warong disesuaikan dengan buku pedoman. (HR)</p> <p>Pembentukan e-warong atau agen penyalur harus sesuai kriteria yang ada. KPM bisa berkelompok untuk membuat sebuah usaha bersama (Kube) yang nantiya mengcover penyaluran bantuan.kendalanya kebanyakan pihak pemberi ijin mempersulit usaha KPM. Termasuk juga sulitnya mendapatkan mesin EDC. (MRA)</p> <p>E-warong dibentuk karena sangat dibutuhkan dalam proses penyaluran program BPNT. (KB)</p> <p>E-warong terdiri dari beberapa KPM dari PKH dan BPNT murni, dan PSM. (HR)</p>
-----------------	---	--	---	--

	<p>pihak terkait atau pihak pemberi ijin mempersulit usaha KPM. Termasuk juga sulitnya mendapatkan mesin EDC (mesin gesek dari pihak bank).</p> <p>(MRA)</p> <p>pada awalnya program BPNT ini tidak ada e-warong. Kemudian seiring berjalannya waktu e-warong sangat dibutuhkan dan sebenarnya <i>e-warong</i> yang menjadi penyalur program. Makanya dibentuk <i>e-warong</i>. (KB)</p> <p>E-warong itu terdiri dari beberapa KPM baik PKH dan BPNT murni, juga disitu ada PSM. (HR)</p>	<p>Program BPNT di Desa Kajarharjo tidak ada e-warong. Kemudian seiring berjalannya waktu e-warong sangat dibutuhkan dan sebenarnya <i>e-warong</i> yang menjadi penyalur program. Makanya dibentuk <i>e-warong</i>. (KB)</p> <p>E-warong itu terdiri dari beberapa KPM baik PKH dan BPNT murni, juga disitu ada PSM. (HR)</p>	<p>(MRA)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ E-warong dibentuk karena sangat dibutuhkan. ➤ E-warong Merupakan sebagai penyalur program BPNT. (KB) ➤ E-warong terdiri dari beberapa KPM, baik PKH dan BPNT murni dan PSM. (HR) 	
Edukasi dan	sosialisasi,hanya kita	Sosialisasi dilakukan	➤ Sosialisasi	Sosialisasi dilakukan hanya kepada

<p>sosialisasi</p>	<p>mengumpulkan semua kadus bahwa pada tanggal ini ada pembagian KKS (kartu keluarga sejahtera) yang diberikan kepada masyarakat yang sekarang Rastra dan diganti BPNT dengan menggesek kartu dan diberikan beras dan telur. Karna itu sudah ada pedumnya harus ada beras dan telur. (HR)</p> <p>sosialisasi sudah dilakukan, selama ini kami pendamping KPM BPNT yang sekaligus PKH atau bukan murni mensosialisasikan dalam setiap pertemuan kelompok di tiap bulannya. Terkait besaran bantuan, cara</p>	<p>hanya kepada semua kadus bahwa akan ada pembagian KKS (kartu keluarga sejahtera) yang diberikan kepada masyarakat yang menerima BPNT dengan cara menggesek kartu dan diberikan beras dan telur. (HR)</p> <p>Sosialisasi dilakukan oleh pendamping KPM BPNT yang sekaligus PKH atau bukan murni mensosialisasikan dalam setiap pertemuan kelompok setiap bulan. Terkait besaran bantuan, cara pencairan maupun pengurusan masalah kehilangan atau tidak cair. (MRA)</p> <p>Sosialisasi diadakan pada pergantian program Rastra ke program</p>	<p>dilakukan hanya kepada semua Kadus.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sosialisasi sebelum pembagian KKS kepada KPM ➤ Sosialisasi berupa memberitahu tentang tatacara penyaluran program. (HR) ➤ Sosialisasi dilakukan oleh pendamping KPM BPNT yang sekaligus PKH atau bukan murni mensosialisasikan dalam setiap pertemuan kelompok setiap bulan. ➤ Terkait besaran bantuan, cara pencairan maupun pengurusan masalah 	<p>semua Kadus. Sosialisasi sebelum pembagian KKS kepada KPM. Sosialisasi berupa memberitahu tentang tatacara penyaluran program. (HR)</p> <p>Sosialisasi dilakukan oleh pendamping KPM BPNT yang sekaligus PKH atau bukan murni mensosialisasikan dalam setiap pertemuan kelompok setiap bulan. Terkait besaran bantuan, cara pencairan maupun pengurusan masalah kehilangan atau tidak cair. (MRA)</p> <p>Sosialisasi dilakukan pada saat pergantian program Rastra kedalam Program BPNT.</p> <p>Sosialisasi kepada KPM dilakukan oleh kepala dusun. (KB)</p> <p>Sosialisasi dilakukan dirumah kepala dusun. (SJ)</p> <p>Sosialisasi dilakukan dirumah pak Kadus.</p>
--------------------	---	---	--	---

	<p>pencairan maupun pengurusan masalah kehilangan atau tidak cair. (MRA)</p> <p>Ada, sosialisasi diadakan ketika pergantian program Rastra ke program BPNT. Sosialisasi kepada KPM dilakukan oleh kepala dusun masing masing. (KB)</p> <p>Ada, dirumahnya pak kadus. Diawalnya. (SJ)</p> <p>Ada, dulu dirumahnya pak kadus. (SH, KPM)</p>	<p>BPNT. Sosialisasi kepada KPM dilakukan oleh kepala dusun masing masing. (KB)</p> <p>Sosialisasi dirumahnya pak kadus. (SJ)</p> <p>Sosialisasi dulu dirumahnya pak kadus. (SH, KPM)</p>	<p>kehilangan atau tidak cair. (MRA)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sosialisasi dilakukan pada saat pergantian program Rastra kedalam Program BPNT. ➤ Sosialisasi kepada KPM dilakukan oleh kepala dusun. (KB) ➤ Sosialisasi dilakukan dirumah kepala dusun. (SJ) ➤ Sosialisasi dilakukan dirumah pak Kadus. (SH, KPM) 	<p>(SH, KPM)</p>
<p>Penyaluran program</p>	<p>karena batuan tersebut non tunai, maka pencairannya melalui agen-agen yang sudah ditetapkan dengan</p>	<p>karena batuan tersebut non tunai, maka pencairannya melalui agen-agen yang sudah ditetapkan dengan kriteria yang sudah</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Batuan tersebut non tunai, maka pencairannya melalui agen-agen yang sudah ditetapkan 	<p>Batuan tersebut non tunai, maka pencairannya melalui agen-agen yang sudah ditetapkan. Dalam pencairannya tidak boleh berupa uang tunai. Berbentuk sembako (beras dan telur) seharga bantuan.</p>

	<p>kriteria yang sudah ditentukan. Dalam pencairannya tidak boleh berupa uang tunai. Melainkan bentuk sembako (beras dan telur) seharga bantuan.</p> <p>(LS)</p> <p>Lupa yang kemarin itu tanggal berapa, sekitar akhir bulan.</p> <p>(YH)</p> <p>Lupa ya, kayaknya setiap tanggal 26.</p> <p>(SJ)</p> <p>Ya gak tau, pokok akhir bulan gitu. (SH, KPM)</p>	<p>ditentukan. Dalam pencairannya tidak boleh berupa uang tunai. Melainkan bentuk sembako (beras dan telur) seharga bantuan.</p> <p>(LS)</p> <p>Penyaluran program BPNT dilaksanakan sekitar akhir bulan.</p> <p>(YH)</p> <p>Penyaluran program BPNT sekitar tanggal 26. (SJ)</p> <p>Penyaluran program BPNT sekitar akhir bulan.</p> <p>(SH, KPM)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dalam pencairannya tidak boleh berupa uang tunai. ➤ Berbentuk sembako (beras dan telur) seharga bantuan. (LS) ➤ Penyaluran program BPNT dilakukan setiap akhir bulan. (YH) ➤ Penyaluran program BPNT sekitar tanggal 26. (SJ) ➤ Penyaluran program BPNT sekitar akhir bulan. (SH, KPM) 	<p>(LS)</p> <p>Penyaluran program BPNT dilakukan setiap akhir bulan.</p> <p>(YH)</p> <p>Penyaluran program BPNT sekitar tanggal 26.</p> <p>(SJ)</p> <p>Penyaluran program BPNT sekitar akhir bulan.</p> <p>(SH, KPM)</p>
<p>Program BPNT</p>	<p>BPNT sangat membantu masyarakat utamanya untuk masyarakat yang miskin membutuhkan seperti janda janda. Memang kami selaku</p>	<p>BPNT sangat membantu masyarakat utamanya untuk masyarakat yang miskin membutuhkan seperti janda janda.</p> <p>BPNT dan PKH merupakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BPNT adalah bantuan pangan non tunai ➤ BPNT dapat membantu masyarakat miskin. ➤ Program BPNT 	<p>BPNT adalah bantuan pangan non tunai. BPNT merupakan program yang digunakan untuk membantu masyarakat miskin. Program BPNT berupa KKS yang berisi Rp. 110.000 yang dapat ditukarkan beras dan telur. (SH)</p>

<p>pemerintah desa berharap dulu setelah dihapusnya raskin masyarakat banyak mengeluh. Sekarang dengan adanya BPNT dan PKH sangat membantu. Apalagi yang PKH, mendapatkan dana dan juga beras. Lha sedangkan BPNT hanya mendapatkan beras dan telur yang nilainya Rp. 110.000. Lha untuk Desa Kajarharjo yang ditargetkan dari 3000 yang menerima masih mendapatkan separuhnya sekitar 1300. Sehingga masyarakat yang sangat memerlukan tapi belum. Saya terus mengajukan BPNT ke Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Sosial. Tapi untuk Program BPNT itu sendiri saya berharap yang sudah</p>	<p>bantuan yang berbeda. BPNT mendapatkan beras dan telur yang nilainya Rp. 110.000. Sedangkan PKH berupa uang untuk membantu KPM yang memiliki anak. Yang menerima program BPNT di Desa Kajarharjo berjumlah 1300. (SH) Program BPNT merupakan program pengganti Rastra, program BPNT berupa beras dan telur. Selain itu program BPNT digunakan untuk memsejahterakan masyarakat yang kurang mampu. (KB)</p>	<p>berupa beras dan telur</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Program PKH berupa uang tunai. ➤ Jumlah penerima program BPNT adalah 1300 KPM. (SH) ➤ Program BPNT merupakan program pengganti Rastra ➤ Program BPNT berupa beras dan telur. ➤ Program BPNT untuk memsejahterakan masyarakat miskin. (KB) 	<p>Program BPNT merupakan pengganti Rastra yang mana program BPNT berupa beras dan telur untuk memsejahterakan masyarakat yang kurang mampu. (KB)</p>
---	---	---	---

	<p>kelas menengah , yang boleh dikatakan ekonominya sudah mulai bagus itu bisa dialihkan.bisa dialihkan melalui MUSDes. Cuma prosesnya sangat panjang. Harus kabupaten dulu, kabupaten melakukan verifikasi nanti turunnya itu. Kami sudah mengajukan kemarin 80 orang itu pengganti. (SH)</p> <p>Program BPNT merupakan program lanjutan dari Rastra. Yang mana program tersebut berupa beras dan telur. Program tersebut dikeluarkan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu. (KB)</p>			
<p>Kebijakan Program</p>	<p>sebelumnya ada 2 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan</p>	<p>BPNT ini yang dulunya Rastra kemudian oleh kementerian RI diganti</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BPNT bermula dari program Rastra ➤ Kebijakan program 	<p>Program BPNT merupakan program pengganti Program Rastra. Program BPNT digunakan untuk menanggulangi</p>

<p>pembagian kartu dan tahapan penyediaan barang. Yang pertama tahapan pembagian kartu itu program BPNT ini yang dulunya Rastra kemudian oleh kementerian RI diganti BPNT. BPNT itu juga berdasarkan Rastra tahun 2017. Jadi kartunya sudah ada di kementerian tinggal kita membagikan aja ke masyarakat. yang terjadi kemarin pada tahun 2018 kalau gak salah bulan 3 atau tidak bulan 5. Itu dibagikan kartunya, tidak semua terbagi. Jadi Kajarharjo itu kurang lebih 1329 KPM. Yang pertama dibagikan kurang lebih 794 KPM, karna apa kartunya masih ada dikementerian. Setelah itu dibagikan, dicairkan kalau gak salah bulan 7. Kemudian yang kedua pelaksanaan</p>	<p>BPNT. BPNT itu juga berdasarkan Rastra tahun 2017. Jadi kartunya sudah ada di kementerian tinggal kita membagikan aja ke masyarakat. yang terjadi kemarin pada tahun 2018 kalau gak salah bulan 3 atau tidak bulan 5. (HR)</p> <p>Program BPNT pengganti rastra Tahun 2017 yang sebelumnya juga sudah diatur dalam UU. (KB)</p> <p>penghentian bantuan kepada KPM (graduasi) meliputi dua hal yang pertama karena KPM sudah sadar atau merasa banyak yang lebih membutuhkan. Dan yang kedua karena taraf hidupnya sudah memenuhi syarat khususnya perekonomian keluarga dibanding tanggungan keluarga sudah diatas rata-rata. (MRA)</p> <p>jika ada warga yang layak dapat bantuan tapi belum</p>	<p>BPNT berasal dari program Rastra tahun 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Program BPNT dijalankan pada tahun 2018. ➤ Program BPNT memiliki 2 kebijakan. Yang pertama kebijakan pembagian kartu yang harus adanya sosialisasi. Kebijakan kedua yaitu pada proses penyaluran yaitu harus melalui e-warong. (HR) ➤ Program BPNT pengganti program Rastra tahun 2017 ➤ Terdapat UU yang mengatur program tersebut. (KB) ➤ penghentian bantuan kepada KPM (graduasi) ➤ yang pertama karena KPM sudah sadar atau merasa banyak yang lebih 	<p>kemiskinan sesuai dengan kebijakan Rastra tahun 2017. Program BPNT mulai dijalankan pada Mei 2018. Program BPNT memiliki 2 tahapan yang pertama adalah proses sosialisasi penyaluran KKS dan yang kedua proses pembagian program. (HR)</p> <p>Program BPNT sebagai pengganti program Rastra tahun 2017. Dimana program tersebut sudah tercantum dalam UU. (KB)</p> <p>penghentian bantuan kepada KPM (graduasi)</p> <p>pertama karena KPM sudah sadar atau merasa banyak yang lebih membutuhkan.</p> <p>kedua karena taraf hidupnya sudah memenuhi syarat khususnya perekonomian keluarga dibanding tanggungan keluarga sudah diatas rata-rata. (MRA)</p> <p>jika ada warga yang layak dapat bantuan tapi belum dapat bantuan, maka bisa diajukan melalui musyawarah desa untuk dimasukan kepada warga layak menerima bantuan dalam lingkup desa (data BDT)</p> <p>nantinya diajukan melalui dinas. Untuk</p>
---	--	---	--

<p>dicairkan dan di handel oleh e-warong. E-warong itu terdiri dari beberapa KPM baik PKH dan BPNT murni, juga disitu ada PSM.</p> <p>(HR)</p> <p>sebenarnya program BPNT lanjutan dari program Rastra, kalau gak salah tahun 2017. Ada UU yang ngatur tentang rastra. Kemudian sama pemerintah diganti dengan program BPNT.</p> <p>(KB)</p> <p>penghentian bantuan kepada KPM (graduasi) meliputi dua hal yang pertama karena KPM sudah sadar atau merasa banyak yang lebih membutuhkan. Dan yang kedua karena taraf hidupnya sudah memenuhi syarat khususnya perekonomian keluarga dibanding tanggungan</p>	<p>dapat bantuan, maka bisa diajukan melalui musyawarah desa untuk dimasukan kedata warga layak menerima bantuan dalam lingkup desa (data BDT). Yang nantinya diajukan melalui dinas. Untuk penerima yang sudah meninggal bantuannya akan dihentikan.</p> <p>(MRA)</p>	<p>membutuhkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ yang kedua karena taraf hidupnya sudah memenuhi syarat khususnya perekonomian keluarga dibanding tanggungan keluarga sudah diatas rata-rata. (MRA) ➤ jika ada warga yang layak dapat bantuan tapi belum dapat bantuan, maka bisa diajukan melalui musyawarah desa untuk dimasukan kedata warga layak menerima bantuan dalam lingkup desa (data BDT) ➤ nantinya diajukan melalui dinas. Untuk penerima yang sudah meninggal bantuannya akan dihentikan. (MRA) 	<p>penerima yang sudah meninggal bantuannya akan dihentikan.</p> <p>(MRA)</p>
---	--	--	---

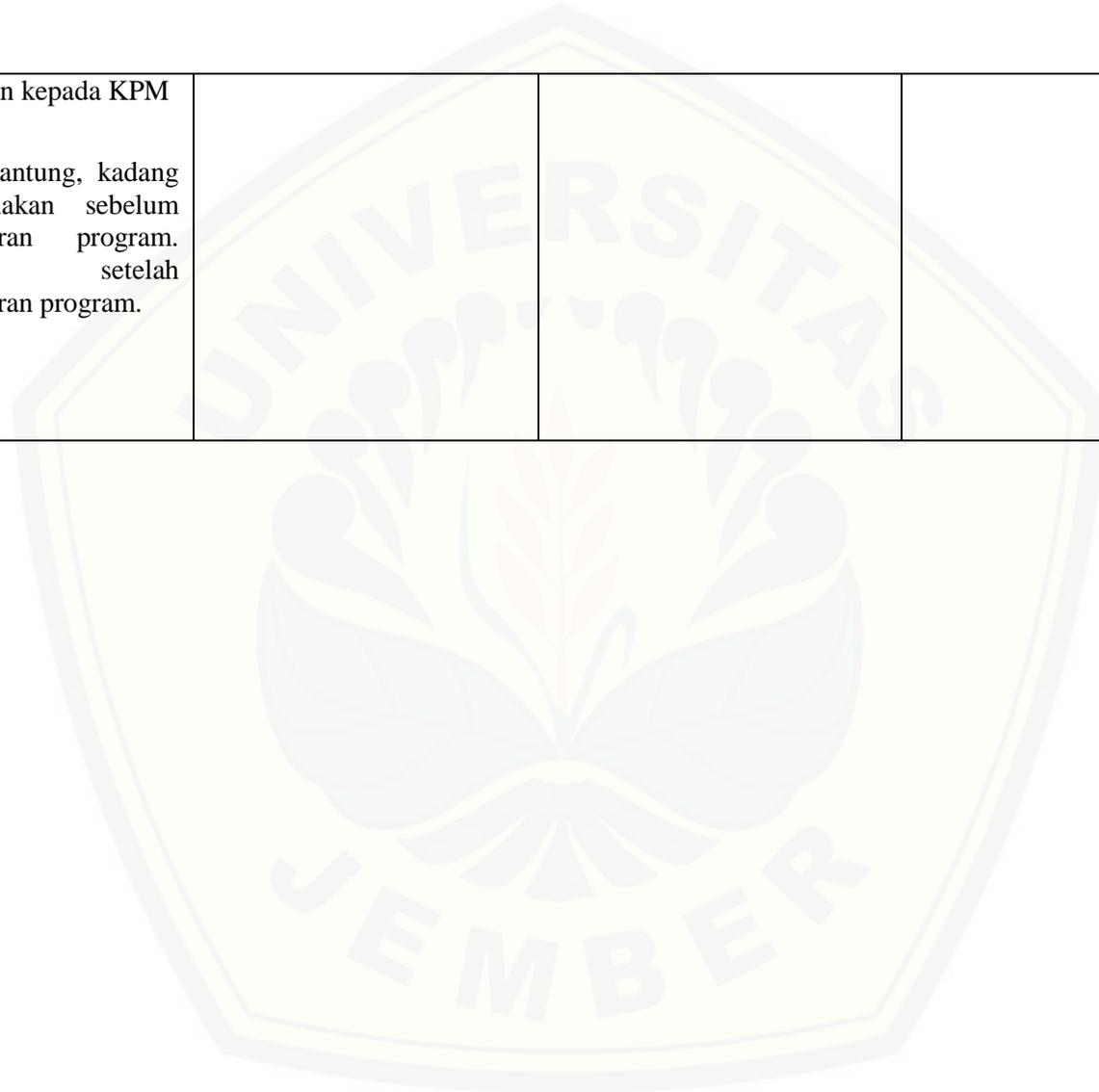
	<p>keluarga sudah diatas rata-rata. (MRA)</p> <p>jika ada warga yang layak dapat bantuan tapi belum dapat bantuan, maka bisa diajukan melalui musyawarah desa untuk dimasukan kedata warga layak menerima bantuan dalam lingkup desa (data BDT). Yang nantinya diajukan melalui dinas. Untuk penerima yang sudah meninggal bantuannya akan dihentikan. (MRA)</p>			
KPM	<p>Program BPNT sedikit mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya program BPNT sangat terbanatu sekali. (YH)</p> <p>Program BPNT merupakan program lanjutan dari Rastra. Yang mana program</p>	<p>Program BPNT dapat mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya program BPNT KPM merasa terbantu. (YH)</p> <p>Program BPNT merupakan program pengganti rastra yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program BPNT dapat membantu memenuhi kebutuhan ➤ KPM sangat terbantu dengan adanya program BPNT. (YH) ➤ Program BPNT merupakan program pengganti Rastra. 	<p>Dengan adanya Program BPNT, KPM merasa sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. (YH)</p> <p>Program BPNT merupakan program pengganti Rastra yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu. (KB)</p>

	tersebut berupa beras dan telur. Program tersebut dikeluarkan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu. (KB)	mampu. (KB)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program BPNT untuk mensejahterakan masyarakat kurang mampu. (KB) 	
Evaluasi program BPNT	Jelas ada evaluasi karena evaluasi atau verifikasi data, karena masyarakat yang menerima bantuan BPNT semuanya memang layak untuk dibantu. Jadi untuk dinas sosial sendiri per 6 bulan ada verifikasi data. Jadi verifikasi data itu untuk mengkongkritkan mengfalidasikan data kepada masyarakat yang betul betul sudah tidak layak dibantu BPNT dialihkan kembali kemasyarakat yang kurang mampu. Evaluasi sudah menghasilkan beberapa KPM yang divalidasi dan sampai saat ini	Evaluasi atau verifikasi data, karena masyarakat yang menerima bantuan BPNT semuanya memang layak untuk dibantu. Jadi untuk dinas sosial sendiri per 6 bulan ada verifikasi data. Jadi verifikasi data itu untuk mengkongkritkan mengvalidasikan data kepada masyarakat yang betul betul sudah tidak layak dibantu BPNT dialihkan kembali kemasyarakat yang kurang mampu. Evaluasi sudah menghasilkan beberapa KPM yang divalidasi dan sampai saat ini pergantian untuk verifikasi data yang dialihkan kepada masyarakat yang layak untuk dibantu belum keluar. Untuk saat ini yang	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Evaluasi atau verifikasi data ➤ untuk dinas sosial sendiri per 6 bulan ada verifikasi data ➤ verifikasi data itu untuk mengkongkritkan mengvalidasikan data kepada masyarakat yang betul betul sudah tidak layak dibantu BPNT dialihkan kembali kemasyarakat yang kurang mampu. (HR) ➤ Dibutuhkan sosialisasi, koordinasi, maupun kerjasama baik pendamping (BPNT murni atau TKSK 	Evaluasi atau verifikasi data, untuk dinas sosial sendiri per 6 bulan ada verifikasi dataa. verifikasi data untuk mengkongkritan dan mengvalidasikan data kepada masyarakat yang betul betul sudah tidak layak dibantu BPNT dialihkan kembali kemasyarakat yang kurang mampu. (HR) Dibutuhkan sosialisasi, koordinasi, maupun kerjasama baik pendamping (BPNT murni atau TKSK maupun BPNT dan PKH), agen penyalur, pihak perbankan, agar permasalahan dan pemberi layanan kepada masyarakat bisa efektif dan efisien. Kesadaran dari berbagai pihak dalam menjalankan sesuai sop yang berlaku. Baik itu barang, penyalur program maupun penentuan agen penyalur. (LS) TKSK dan pendamping Desa melakukan

	<p>pergantian untuk verifikasi data yang dialihkan kepada masyarakat yang layak untuk dibantu belum keluar. Untuk saat ini yang sudah diverifikasi sudah tidak menerima karena kartunya sudah dikembalikan kepada kementerian pusat dan diganti dengan KPM baru yang kartunya belum keluar. (HR)</p> <p>a. Dibutuhkan sosialisasi, ‘koordinasi, maupun kerjasama baik pendamping (BPNT murni atau TKSK maupun BPNT dan PKH), agen penyalur, pihak perbankan, agar permasalahan dan pemberi layanan kepada masyarakat bisa efektif dan efisien. b. Kesadaran dari berbagai pihak dalam</p>	<p>sudah diverifikasi sudah tidak menerima karena kartunya sudah dikembalikan kepada kementerian pusat dan diganti dengan KPM baru. (HR)</p> <p>a. Dibutuhkan sosialisasi, koordinasi, maupun kerjasama baik pendamping (BPNT murni atau TKSK maupun BPNT dan PKH), agen penyalur, pihak perbankan, agar permasalahan dan pemberi layanan kepada masyarakat bisa efektif dan efisien. b. Kesadaran dari berbagai pihak dalam menjalankan sesuai sop yang berlaku. Baik itu barang, penyalur program maupun penentuan agen penyalur. (LS)</p> <p>Yang selalu koordinasi adalah TKSK dan pendamping Desa. Kalau e-warong kan hanya sebagai penyalur. Tapi kalau pendamping Desa dan</p>	<p>maupun BPNT dan PKH), agen penyalur, pihak perbankan, agar permasalahan dan pemberi layanan kepada masyarakat bisa efektif dan efisien</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kesadaran dari berbagai pihak dalam menjalankan sesuai sop yang berlaku. Baik itu barang, penyalur program maupun penentuan agen penyalur. (LS) ➤ TKSK dan pendamping Desa melakukan koordinasi terkait program BPNT ➤ Melakukan evaluasi kinerjanya, beras dan penyalurannya. (SR) ➤ Evaluasi ada setelah penyaluran program BPNT dan sebelum. ➤ Mempersiapkan 	<p>koordinasi terkait program BPNT. Serta melakukan evaluasi kinerjanya, beras dan penyalurannya. (SR)</p> <p>Evaluasi ada setelah penyaluran program BPNT dan sebelum. Yaitu mempersiapkan bahan-bahan yang akan diberikan kepada KPM. (OA)</p> <p>Evaluasi dilaksanakan sebelum penyaluran program. Kadang setelah penyaluran program. (KB)</p>
--	---	---	---	---

<p>menjalankan sesuai sop yang berlaku. Baik itu barang, penyalur program maupun penentuan agen penyalur.</p> <p>(LS)</p> <p>Ya sebetulnya seperti itu. Yang selalu koordinasi adalah TKSK dan pendamping Desa. Kalau e-warong kan hanya sebagai penyalur. Tapi kalau pendamping Desa TKSK selalu melakukan koordinasi. Melakukan evaluasi kinerjanya bagaimana, trus berasnya bagaimana, trus penyalurannya bagaimana.</p> <p>(SR)</p> <p>Biasanya evaluasi ada setelah penyaluran program BPNT dan sebelum pas waktu mempersiapkan bahan-bahan yang akan</p>	<p>TKSK selalu melakukan koordinasi. Melakukan evaluasi kinerjanya bagaimana, berasnya bagaimana, dan penyalurannya bagaimana.</p> <p>(SR)</p> <p>Evaluasi ada setelah penyaluran program BPNT dan sebelum. Yaitu waktu mempersiapkan bahan-bahan yang akan diberikan kepada KPM</p> <p>(OA)</p> <p>Evaluasi dilaksanakan sebelum penyaluran program. Kadang setelah penyaluran program.</p> <p>(KB)</p>	<p>bahan-bahan yang akan diberikan kepada KPM.</p> <p>(OA)</p> <p>➤ Evaluasi dilaksanakan sebelum penyaluran program. Kadang setelah penyaluran program.</p> <p>(KB)</p>	
--	--	--	--

	<p>diberikan kepada KPM (OA) Ya tergantung, kadang dilaksanakan sebelum penyaluran program. Kadang setelah penyaluran program. (KB)</p>			
--	---	--	--	--



LAMPIRAN D. DOKUMENTASI FOTO PENELITIAN





**Gambar 1 Wawancara KPM 8
Februari 2019**





**Gambar 2 Meminta Data Jumlah Penerima Program
BPNT Tanggal 28 Januari 2019**





Gambar 3 Observasi penyaluran program BPNT Tanggal 15-02-2019



Gambar 4 Tanggal 15-02-2019 wawancara dengan TKS (pendamping program BPNT)



Gambar 5 Wawancara dengan informan yang menerima BPNT + PKH 18-2-2019



Gambar 6 Pengarahan program BPNT 20-02-2019



Gambar 7 Pertemuan kelompok 27-02-2019